

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA (KB) DI KAMPUNG TUALANG
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



RUDIYANSAH
167310436

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”, dalam penyelesaian Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah Skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan dukungan terhadap skripsi yang penulis buat ini.
4. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;

7. Teristimewa orang tua penulis Ayahanda Suprapselo (Alm) dan Ibunda Hanifah yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini;
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 terkhusus kelas IP E dan sahabat MMS yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya proposal ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 05 November 2020

Penulis

Rudiyansah

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
SURAT PERNYATAAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian	18
2. Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	20
1. Konsep Pemerintahan	20
2. Konsep Ilmu Pemerintahan	23
3. Konsep Pemerintahan Desa	24
5. Konsep Tugas Pembantuan	26
6. Konsep Pemberdayaan	27
7. Tahapan Pemberdayaan	30
B. Penelitian Terdahulu.....	32

C. Kerangka Pikir	35
D. Proposisi Penelitian.....	36
E. Konsep Operasional.....	36
F. Operasionalisasi Variabel	39
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	42
D. Teknik Penarikan Informan.....	43
E. Jenis dan Sumber data.....	43
F. Teknik Pengumpulan data.....	44
G. Teknik Analisis data.....	45
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	46
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	47
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Siak	49
1. Letak Geografis Kabupaten Siak	49
2. Penduduk Kabupaten Siak	51
B. Sejarah Singkat Kampung Tualang	52
1. Demografi Kampung Tualang.....	54
2. Visi dan Misi Kampung Tualang	55
3. Struktur Pemerintahan Kampung Tualang.....	57
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	58
B. Hasil Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	61
1. Pemungkinan.....	62

2. Penguatan	67
3. Perlindungan	72
4. Penyokongan.....	77
5. Pemeliharaan.....	82
C. Faktor Penghambat Jalannya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana	87

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93

DAFTAR KEPUSTAKAAN	94
---------------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. Jumlah penduduk di setiap dusun Kampung Tualang tahun 2017.....	4
I.2. Jumlah penduduk disetiap dusun Kampung Tualang tahun 2018.....	4
I.3. Jumlah penduduk disetiap dusun Kampung Tualang tahun 2019.....	4
I.4. Daftar Jumlah Kampung KB di Kabupaten Siak.....	13
II.1. Penelitan Terdahulu.....	32
II.2. Operasional Variabel.....	39
III.1. Informan Penelitian.....	42
III.2. Jadwal dan Kegiatan Penelitian.....	46
IV.1. Jumlah Penduduk Kampung Tualang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
V.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
V.2. Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	59
V.3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka pemikiran penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung KB (Keluarga Berencana) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	35
IV.1	Struktur Pemerintahan Kampung Tualang.....	57

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RudiYansah
NPM : 167310436
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul UP : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Atas Naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, Naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 November 2020

Pelaku Pernyataan



RudiYansah

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA (KB) DI KAMPUNG TUALANG
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

ABSTRAK

**RUDIYANSAH
167310436**

Penelitian ini dilakukan atas dasar Masih Kurangnya kepedulian Masyarakat terhadap Program Kampung Keluarga Berencana di Kampung Tualang dan Kurangnya pemahaman masyarakat akibat perbedaan tingkat pengetahuan, pendidikan, usia, pengalaman, pekerjaan, jenis kelamin, dan umur serta pola pikir atau persepsi masyarakat yang masih beranggapan bahwa memiliki banyak anak banyak rejeki, serta kurangnya Kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup melalui Program Kampung Keluarga Berencana. Program Kampung Keluarga Berencana merupakan suatu bentuk program Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke taraf yang lebih baik serta membatasi terjadinya ledakan penduduk, mengentaskan kemiskinan, serta memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan juga untuk mengetahui hambatan dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Tualang Kabupaten Siak dengan menggunakan teori Pemberdayaan Suharto (2005:67) dengan indikator dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode Kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak selama ini belum berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Program Kampung KB

**COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH THE KAMPUNG FAMILY
PLANNING (KB) PROGRAM IN TUALANG VILLAGE, TUALANG
DISTRICT, SIAK DISTRICT**

ABSTRACT

**RUDIYANSAH
167310436**

This research was conducted on the basis of the lack of community concern for the Family Planning Village Program in Kampung Tualang and the lack of understanding of the community due to differences in levels of knowledge, education, age, experience, occupation, gender, and age as well as patterns of thought or perceptions of people who still think that they have Many children have a lot of luck, as well as a lack of public awareness in improving the quality of life through the Family Planning Village Program. The Family Planning Village Program is a form of community empowerment program that aims to improve the quality of life of the community to a better level and limit the occurrence of population explosion, alleviate poverty, and empower the potential of the community to play a real role in development. The purpose of this research is to describe and analyze how Community Empowerment through the Family Planning Village (KB) Program in Tualang Village, Tualang District, Siak Regency, and also to find out the obstacles in carrying out Community Empowerment through the Family Planning Village Program (KB) in Tualang Village, Siak Regency. using the theory of Empowerment Suharto (2005: 67) with indicators in conducting Community Empowerment, namely Enabling, Strengthening, Protection, Support, and Maintenance. The method used in this research is a qualitative method. The results of the study concluded that Community Empowerment through the Family Planning Village Program in Tualang Village, Tualang District, Siak Regency so far has not been effective.

Keywords: Community Empowerment, Family Planning Village Program

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Keberhasilan dari suatu pemerintahan terletak pada pemerintahannya sendiri.

Dalam hal ini juga pemerintah telah membuat undang-undang mengenai pemerintahan desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang isinya menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya, desa merupakan awal bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara modern ini terbentuk, kesatuan sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan dari luar (Santoso, 2003:2).

Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/ kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Maka dalam hal pengaturan kepentingan masyarakat desa guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di desa sebagai tuntunan reformasi dan pemerataan pembangunan, maka desa wajib menyusun peraturan sendiri (Peraturan Desa). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa desa merupakan entitas bangsa yang telah membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Permasalahan yang melanda desa pada umumnya ialah terletak pada kesejahteraan penduduknya. Tentunya ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, minimnya sarana dan prasarana di pedesaan, terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan serta masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat perdesaan karena terbatasnya akses masyarakat perdesaan. Salah satu

penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat adalah karena adanya ketimpangan antara jumlah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan. Selain banyaknya kemiskinan yang terjadi, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat juga berdampak pada ledakan penduduk.

Permasalahan kependudukan ini menjadi salah satu permasalahan serius yang melanda Indonesia. Permasalahan kependudukan yang begitu rumit sangat berpengaruh terhadap faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih baik sehingga perlu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Kepadatan penduduk ini juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat di kabupaten Siak terutama di kampung Tualang, karena kampung Tualang merupakan wilayah kawasan industri serta padat penduduknya yang tentunya ini merupakan suatu masalah yang harus diatasi. Penduduk yang produktif merupakan suatu potensi atau aset pembangunan. Sedangkan penduduk yang non produktif merupakan suatu beban dan masalah bagi pembangunan terutama di wilayah kampung Tualang Kabupaten Siak.

Kampung Tualang memiliki jumlah penduduk yang paling padat dari 7 desa yang ada di kecamatan Tualang, karena seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan industri membuat daerah ini menjadi tujuan bagi perantau dari berbagai daerah tentunya kepadatan penduduk ini akan semakin besar jumlahnya jika tidak diberdayakan masyarakatnya dengan cara peningkatan

kualitas hidup keluarga. Berikut tabel jumlah penduduk di setiap dusun kampung Tualang terhitung dari tahun 2017-2019 :

Tabel I.I : Jumlah penduduk di setiap dusun Kampung Tualang Tahun 2017

No	Dusun	Lk	Pr	Lk + Pr	Jlh KK
1	Surya	1.499	1.447	2.946	583
2	Mulyabaru	1.398	1.330	2.728	496
3	Merbau	1.530	1.967	3.497	775
4	Sukadamai	3.163	3.119	6.282	1.395
Jumlah		7.590	7.863	15.453	3.249

Sumber: Laporan Kependudukan Kampung Tualang Tahun 2017

Tabel I.II : Jumlah penduduk di setiap dusun Kampung Tualang Tahun 2018

No	Dusun	Lk	Pr	Lk + Pr	Jlh KK
1	Surya	1.532	1.493	3.025	580
2	Mulyabaru	1.401	1.373	2.774	496
3	Merbau	1.585	1.010	3.595	759
4	Sukadamai	3.158	3.172	6.330	1.336
Jumlah		7.676	8.048	15.724	3.171

Sumber: Laporan Kependudukan Kampung Tualang Tahun 2018

Tabel I.III : Jumlah penduduk di setiap dusun Kampung Tualang Tahun 2019

No	Dusun	Lk	Pr	Lk + Pr	Jlh KK
1	Surya	1.552	1.515	3.067	589
2	Mulyabaru	1.432	1.393	2.825	511
3	Merbau	1.607	2.047	3.654	713
4	Sukadamai	3.139	3.155	6.294	1.261
Jumlah		7.730	8.110	15.840	3.074

Sumber: Laporan Kependudukan Kampung Tualang Tahun 2019

Dilihat dari tabel diatas maka telah terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan di Kampung Tualang terhitung dari tahun 2017-2019. Dengan Kelompok Sasaran ialah Pasangan Usia Subur di Kampung Tualang dengan jumlah 21.349 akumulatif dari tahun 2017-2019 Pasangan Usia Subur dan jumlah penerima program KB atau KB aktif di Kampung Tualang yaitu dengan jumlah 7.764 KK. Sehingga Kampung Tualang sampai saat ini didalam menjalankan Program Kampung KB hanya berjalan 23% saja dan belum mencapai target Nasional sebanyak 25%.

Tentunya hal ini juga dipengaruhi oleh faktor peningkatan angka kelahiran yang terjadi di kampung Tualang setiap tahunnya yang tentunya menjadi sebuah masalah terkait dengan program kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan juga masih ada masyarakat yang belum menyadari serta acuh tak acuh terhadap program Kampung KB tersebut yang mana seperti diketahui bahwa program Kampung KB juga dibuat untuk menekan angka kelahiran atau terjadinya ledakan penduduk melalui program KB.

Maka dari itu pemberdayaan terhadap desa terutama di Kampung Tualang melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB). merupakan strategi penting dan perlu dilakukan didalam pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia yang berkualitas dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial. Program Kampung KB menjadi salah satu inovasi guna menciptakan kehidupan masyarakat yang berkualitas dalam hal ini masyarakat mampu

mandiri dan juga memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan dan tentunya dapat menekan tingkat angka kelahiran.

Pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Sehingga tampak ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah khususnya di perdesaan yang mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

Amanat Presiden Republik Indonesia, kepada BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) agar dapat menyusun suatu kegiatan/program yang dapat memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019, kegiatan tersebut dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). Kampung KB merupakan salah satu kegiatan prioritas yang sesuai dengan instruksi Presiden RI,

terutama sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima oleh masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan langkah koordinasi lintas sektor, terutama dalam integrasi kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB.

Maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Siak menetapkan kampung Tualang menjadi kampung KB pada tahun 2015. Sejak dibentuknya Program Kampung Keluarga Berencana (KB) oleh Pemerintah Pusat pada tahun yang sama guna memperkuat upaya pencapaian target/sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2015-2019 karena Sesuai dengan tujuan Kampung Keluarga Berencana (KB) itu sendiri yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas dan juga karena kampung Tualang memiliki beberapa persyaratan diantaranya penduduk yang padat, sebab wilayahnya merupakan kawasan kumpulan perusahaan yang tentunya merupakan sebuah masalah kependudukan dalam masa pertumbuhannya.

Keterlibatan kabupaten ini juga sebagai bentuk penyelenggaraan Asas Pemerintahan Daerah yang mana didalam menjalankan urusan pemerintahan daerah terdapat 3 Asas pemerintahan daerah yakni Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan. Dalam hal ini keterlibatan kabupaten didalam menjalankan Program Pusat yakni Program Kampung KB itu sendiri termasuk kedalam Asas Tugas Pembantuan yang mana Asas Tugas Pembantuan

itu sendiri ialah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan dalam hal ini ialah dalam penyelenggaraan program kampung keluarga berencana (KB) yang dibuat oleh pusat yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Pihak yang terlibat disini ialah melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengkoordinasikannya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) di Kabupaten Siak melalui Petugas Keluarga Berencana (PKB) yang secara langsung merealisasikannya ke masing-masing kecamatan yang ditunjuk sebagai Kampung KB dalam hal ini Kampung Tualang sehingga dibentuklah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang dibentuk langsung oleh kedinasan untuk melaksanakan program pusat ini di masing-masing kecamatan sebagai bentuk asas tugas pembantuan. Serta yang nantinya bertanggung jawab terhadap jalannya program Kampung KB ini ialah kepala dinas DPPPAPPKB di kabupaten Siak itu sendiri.

Sehingga kabupaten nantinya akan membentuk beberapa kampung yang akan dijadikan sebagai Kampung Kb sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan asas tugas pembantuan tersebut. Sehingga program Pusat yakni Program Kampung KB tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut masalah Pengendalian Penduduk.

Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mempertegas kewenangan tersebut, dimana pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing masing tingkatan perintah yaitu; (1) sub urusan Pengendalian Penduduk, (2) sub urusan Keluarga Berencana, (3) sub urusan Keluarga Sejahtera, dan (4) sub urusan Sertifikasi dan Standarisasi.

Nama Kampung KB bukan terlahir karena ide, bentukan atau program secara khusus, akan tetapi terbentuk karena sebutan masyarakat kepada Kampung Genereh, Desa Genereh, Kecamatan Buahdua Sumedang Provinsi Jawa Barat yang saat itu pada tahun 1972 di Kampung Genereh telah menjadi pusat kegiatan KB dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tentang alat kontrasepsi Pil, karena

telah dibentuk kelompok akseptor yang dititipi persediaan Pil ulang bagi peserta KB. Setiap hari dari beberapa kampung sekitar, banyak orang pergi ke Genereh, mengunjungi rumah ibu Suhamah sebagai Ketua kelompok Akseptor, untuk mengambil Pil ulang. Dengan demikian tiga hakikat kampung KB adalah :

- 1.) Kampung menjadi ikon KB sebagai media kampanye penyebaran program KB;
- 2.) Pembinaan kelangsungan ber KB yang sangat membantu terhadap penurunan angka kelahiran;
- 3.) Pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan pelayanan.

Maka dapat dilihat bahwasanya bentuk pemberdayaan yang dilakukan dari program Kampung Keluarga Berencana (KB) ini ialah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat berupa Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan kepada masyarakat. Pembinaan dilakukan agar masyarakat mampu mandiri dan juga dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya dalam program kampung KB sesuai dengan yang telah ditetapkan, bentuk-bentuk Pembinaan tersebut ialah :

1. Bina Keluarga Balita (BKB) dalam hal ini pembinaan dilakukan dimulai dari proses kelahiran dan juga tumbuh kembangnya balita sehingga masyarakat mampu dan mengerti cara-cara yang baik didalam tumbuh kembangnya balita melalui posyandu setempat.
2. Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam hal ini pembinaan dilakukan kepada kalangan remaja dengan memberikan pengertian khusus atau sosialisasi tentang bahayanya seks bebas serta cara pencegahannya agar kasus-kasus yang ada dikalangan remaja tidak lagi marak terjadi.

3. Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam hal ini pembinaan dilakukan kepada kalangan Lansia dengan memberikan pembinaan berupa memberikan tips-tips kesehatan serta gaya hidup yang sehat sehingga lansia juga diberikan pembinaan khusus.
4. Membina kelangsungan ber KB

Sedangkan didalam hal Pelayanan dilakukan agar masyarakat diberikan layanan semaksimal mungkin dalam Program Kampung Keluarga Berencana tersebut. pelayanan yang dilakukan antara lain berupa :

1. Pelayanan administrasi kependudukan
2. Pelayanan pemeriksaan bumil dan imunisasi di posyandu
3. Penyediaan alat kontrasepsi bagi yang tidak mampu
4. Mengurus jaminan-jaminan kehidupan bagi keluarga (BPJS, Jamkesda)
5. Ayoman sosial bagi peserta Kb yang memiliki keluhan/komplikasi.

Serta Pelatihan yang dilakukan dalam program Kampung Keluarga Berencana (KB) agar masyarakat mampu terampil dan juga memiliki potensi sehingga dapat dikembangkan kedepannya. Pelatihan yang dilakukan dalam program Kampung Keluarga Berencana (KB) yaitu :

1. Pelatihan didalam Pemasangan Alat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur.
2. Pelatihan berupa kursus kerajinan tangan dari rotan, kursus perbengkelan, kursus tata rias yang tentunya akan meningkatkan ekonomi kampung KB tersebut

3. Pelatihan berupa penataan kampung yang baik seperti Gerakan Penanaman Tanaman Halaman.

Dalam perjalanannya Kampung KB tidak hanya melulu pembinaan KB tetapi di beberapa daerah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan menyeluruh. Kampung KB yang diintegrasikan dalam lomba Desa ditahun 70-an menjadi Kampung KB pancakarya dengan tahapan Kampung KB swadaya, Kampung KB Swakarya dan Kampung KB Swasembada dengan inovasi yang terinspirasi dari pancakarya yaitu budi, cipta, rasa, karsa dan karya tumbuhlah kampung KB dengan kegiatan integrasi dengan pengajian, arisan, jimpitan dsb.

Tahun 2009 tercipta penjelmaan Kampung KB yang dikaitkan dengan sampah dan pariwisata. Para pencetus Kampung KB mengkaitkan apabila KB nya sukses maka sampah akan berkurang/terkendali dan pariwisata akan indah sehingga dibentuk Kampung KB di lokasi Pariwisata di Kota Sukabumi. Banyak perkembangan Kampung KB yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, inovasi dan kreatifitas yang dibangun di masing-masing daerah. Sejarah mencatat Kampung KB di kota Banjar Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2011 mendapatkan Government Inovative Award, dari Departemen Dalam Negeri yang melombakan program-program pemberdayaan dari seluruh Departemen/Lembaga diseluruh Indonesia. Inilah Kampung KB sangat membanggakan.

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) secara utuh di lini lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur

pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah membuat peta 1 kecamatan 1 kampung KB, sehingga membuat kecamatan memiliki 1 kampung KB. Kabupaten Siak sendiri telah menetapkan 14 kampung KB diseluruh kecamatan antara lain Kampung Tumang, Kota Ringin, Lubuk Tilan, Buatan 1, Jayapura, Selat Guntung, Tanjung Kuras, Perincit, Harmonis, Gabung Makmur, Bencah Umbai, Minas Timur, kandis dan Tualang.

Tabel I.IV : Daftar Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Siak

NO	NAMA KAMPUNG KB (KELUARGA BERENCANA)
1	KAMPUNG TUMANG
2	KAMPUNG KOTA RINGIN
3	KAMPUNG LUBUK TILAN
4	KAMPUNG BUATAN I
5	KAMPUNG JAYAPURA
6	KAMPUNG SELAT GUNTUNG
7	KAMPUNG TANJUNG KURAS
8	KAMPUNG PERINCIT
9	KAMPUNG HARMONIS
10	KAMPUNG GABUNG MAKMUR
11	KAMPUNG BENCAH UMBAI
12	KAMPUNG MINAS TIMUR

NO	NAMA KAMPUNG KB (KELUARGA BERENCANA)
13	KAMPUNG KANDIS
14	KAMPUNG TUALANG

Sumber: Juknis Kampung KB Kabupaten Siak 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya di Kabupaten Siak sendiri yang menjalankan Program Kampung Kb sudah ada 14 Kampung KB antara lain Kampung Tumang, Kota Ringin, Lubuk Tilan, Buatan 1, Jayapura, Selat Guntung, Tanjung Kuras, Perincit, Harmonis, Gabung Makmur, Bencah Umbai, Minas Timur, kandis dan Tualang. Diharapkan program kampung KB di wilayah Kampung Tualang mampu menjadi percontohan Kampung KB di wilayah lain karena wilayah tersebut padat penduduk dan juga padat industri. Diharapkan Kampung KB menjadi figur pelaksanaan program Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera di wilayah tingkat RW, Dusun, Kelurahan atau yang setara dengan syarat atau kriteria yang telah ditentukan. Kampung KB ditujukan bagi daerah yang miskin, padat penduduk, terpencil, wilayah pesisir pantai, atau perbatasan suatu wilayah dengan akses pelayanan kesehatan yang sangat minim.

Pemerintah Kabupaten Siak sendiri telah menjalankan program KB ini sesuai dengan perintah BKKBN melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) di Kabupaten Siak yang terlibat langsung dalam melaksanakan program kampung KB di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Siak yang dianggap desa tersebut menjadi sasaran dari program kampung KB sesuai dengan

kriteria yang telah ditentukan oleh BKKBN. Serta yang nantinya akan bertugas menginstruksikan pembentukan Kelompok Kerja di setiap kecamatan seperti pembentukan ketua yakni kepala desa, sekretaris yakni petugas lapangan kampung KB, bendahara yakni ketua PKK tingkat desa serta pelaksana operasional atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) ini memiliki berbagai sektor didalam upaya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Sektor-sektor yang dimaksud ialah seperti Sektor Pendidikan, Sektor Keagamaan, Sektor Ekonomi, Sektor Reproduksi, dan Sektor Pembinaan Lingkungan. Masing-masing sektor memiliki bentuk program yang akan dilakukan guna merealisasikannya kepada masyarakat dan tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bentuk program tersebut berupa :

- 1) Sektor Pendidikan merencanakan pembentukan kelompok kegiatan (Bina Keluarga) dan Perpustakaan Kampung.
- 2) Sektor Keagamaan membuat program maghrib mengaji, sembahyang dan jadwal pengajian rutin.
- 3) Sektor Ekonomi membentuk UPPKS dan bekerjasama dengan toko serbaguna dalam memasarkan produk.
- 4) Sektor Reproduksi membuat jadwal pelayanan KB, jadwal pelaksanaan posyandu.
- 5) Sektor Pembinaan Lingkungan membuat jamban keluarga, dan memperbaiki jalan kampung.

Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari proses politik, sosial, budaya yang meliputi bangsa, di dalam kebulatannya.

Pembangunan nasional merupakan cerminan kehendak terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Penduduk merupakan sumber daya atau aset suatu bangsa. Pertumbuhan penduduk bagi suatu negara dapat mempengaruhi perkembangan bangsa. Ini tergantung bagaimana kualitas penduduknya. Apabila laju pertumbuhan penduduk tinggi, maka dituntut kualitas hidup atau kemakmuran semakin tinggi. Bagi negara Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini merupakan suatu beban atau suatu refusi. Karena bagi Negara Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh pada pembangunan. Kualitas sumber daya manusia penduduk Indonesia yang rendah merupakan penghambat pembangunan.

Fokus penelitian ini adalah pada Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung KB (Keluarga Berencana) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui program kampung KB tersebut, sudahkah sesuai dengan

juknis dari kampung KB tersebut. Dimana program kampung KB ini tidak hanya terfokus pada program KB saja namun program kampung KB melakukan pemberdayaan dalam berbagai sektor seperti keagamaan, pendidikan/sosialisasi, reproduksi, ekonomi, perlindungan, kasih sayang, sosial budaya, dan pembinaan lingkungan.

Namun ihwal pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui program kampung KB tersebut di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak peneliti menemukan beberapa fenomena yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup melalui program Kampung Keluarga Berencana (KB). Terbukti dengan masih tingginya tingkat angka kelahiran di kampung Tualang.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat akibat perbedaan tingkat pengetahuan, pendidikan, usia, pengalaman, pekerjaan, jenis kelamin dan umur serta pola pikir atau persepsi masyarakat yang masih beranggapan bahwa memiliki banyak anak banyak rejeki.
3. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap program pemerintah tentang Kampung Keluarga Berencana (KB).

Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul,
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan latar belakang dan fenomena diatas telah dijelaskan bagaimana jalannya pemerintahan, oleh karena itu penulis telah merumuskan masalah yaitu tentang :

1. Bagaimanakah Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
2. Apa saja hambatan dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1). Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2). Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan nantinya, peneliti sangat berharap bahwa hasil penelitian dapat bermanfaat untuk :

a. Secara Teoritis

Berguna dalam pengembangan pengetahuan kajian ilmu pemerintahan terutama di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

b. Secara Praktis

Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintahan Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam menjalankan program Kampung Keluarga Berencana (KB).

c. Secara Akademis

Bisa dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul ‘pemberdayaan masyarakat melalui program kampung keluarga berencana (KB) di kampung tualang kecamatan tualang kabupaten siak’’ maka penulis menggunakan beberapa konsep teoritis yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan penulis teliti, antara lain.

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Ndraha (2005 : 36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Nurcholis (2004 : 178-179) pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi : (1) memberikan pelayanan atau servis baik pelayanan perorangan maupun pelayanan public/khalayak. (2) melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan (3) memberikan perlindungan/potensi masyarakat.

Selanjutnya menurut Suryaningrat (1992 : 2) pemerintahan adalah perbuatan atau cara/ urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok individu yang

mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan.

Pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari Negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak digunakan (Nugroho, 2003 : 36).

Menurut Ndraha (2005 : 57) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif. Sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga. Pertama adalah fungsi pembangunan, kedua fungsi pemberdayaan, dan ketiga fungsi pelayanan.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan. Namun didalam menjalankan ketiga fungsi diatas, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

Apabila ditinjau dari definisi pemerintah, Syafie (2005 : 20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang perintah memiliki ketaatan.

Rasyid (2002 : 14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas Negara melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantarawarga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi. Didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih baik.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kemudian menurut Ndraha (2003 : 76) mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terbagi dua yaitu fungsi primer dan sekunder. Dimana fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang perintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan social masyarakat. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua jenis fungsi itu disingkat sebagai pelayanan (*servicing*). Fungsi pelayanan ini bersifat universal. Dijalankan oleh semua bangsa dan Negara diseluruh dunia, baik Negara maju maupun yang sedang berkembang, sesuai dengan kondisi masing-masing. Fungsi ini telah banyak dibahas orang dan dipelajari oleh semua ilmu pengetahuan social dan humaniora, dan diaplikasikan secara luas, baik dibidang privat, public maupun social. Dan fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negative dengan

kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang diperintah, dalam arti semakin tinggi tariff hidup, semakin kuat *bargaining position* dan semakin interaktif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Jadi dari uraian di atas dapat di simpulkan Pemerintahan (*governance*) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintah. Pemerintah dalam hubungan ini berfungsi memproduksi alat-alat pemenuhan kebutuhan manusia dan masyarakat (*civil dan public sevice*) yang bersifat objektif, *common to all people*, melalui pelayanan impartial menuju keseimbangan yang nyata.

2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie (2010:23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pelaksanaan pengurusan, pengaturan, kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun rakyatdenganpemeintahnya). Dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Gaffar (Dalam Ndraha, 2010:16) mendefenisikn ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari prosespolitik (alokasi otoritarif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahn sebagai Negara. Menurut Brasz (Dalam Syafiie, 2007:20) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan

umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Ndraha (2011: 7) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (Sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Kemudian menurut Wasistiono (2015: 61) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi tertinggi suatu Negara yakni pemerintah berhubungan dengan masyarakatnya dalam kaitan hak dan kewajiban kepada Negara. Sebaiknya warga Negara mempunyai hak dan kewajiban kepada Negara.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan pengertian Ilmu pemerintahan didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dalam layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Dengan begitu ilmu pemerintahan digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dengan dipintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan

3. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Suprihatini (2007 : 1) asal “Desa” adalah dari istilah India, yaitu “*swadesi*”. Swadesi berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma,

serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa ini, juga bisa disebut dengan istilah lain pada daerah-daerah tertentu. Misalnya saja: dusun dan marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, dan di Maluku, nagari di Sumatera Barat atau Wanua di Minahasa. Masih banyak istilah-istilah lain dari desa di beberapa daerah yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Terjadinya perbedaan istilah desa tersebut tidak lain karena dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat dari setiap desa yang bersangkutan.

Menurut Kartohadikoesoemo (1984 : 280) desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri.

Menurut Ndraha (1981 : 13) desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Menurut Handono (2005 : 132) desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu: (1) desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam, dan (2) desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.

Menurut Nurcholis (2011 : 81) bahwa “desa adalah suatu pemerintahan terendah”. Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. keuangan desa adalah semua hak semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

5. Konsep Tugas Pembantuan

Menurut Koswara (2003 : 45) Tugas pembantuan adalah penugasan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskannya.

Sedangkan menurut Joeniarso (1979: 31), disamping pemerintah lokal/daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangga urusan-urusan rumah tangganya sendiri, kepadanya dapat pula diberi Tugas-tugas Pembantuan (medebewind). Adapun Tugas Pembantuan adalah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasannya.

Lebih lanjut Bagir Manan (2001: 147) mengemukakan bahwa urusan rumah tangga dalam Tugas Pembantuan hanya mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibantu, sedangkan substansi tetap ada satuan pemerintahan yang dibantu. Baik dalam otonomi maupun Tugas Pembantuan, daerah sama-sama mempunyai kebebasan mengatur dan menyelenggarakan urusan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan kepentingan umum. Dari berbagai peraturan

perundang-undangan pendapat para ahli sebagaimana dikemukakan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa inisiatif pemberian Tugas Pembantuan selalu datang dari pemberi tugas.

Dalam pemerintahan bahwa sebagai konsekuensi dari pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang kemudian diperjelas dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, Pemerintah diwajibkan melaksanakan Asas Desentralisasi dan Asas Dekonsentrasi dalam menyelenggarakan Pemerintah di Daerah. Tetapi disamping Asas Desentralisasi dan Asas Dekonsentrasi undang-undang ini juga memberikan dasar-dasar bagi penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut Asas Tugas Pembantuan.

6. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Dalam Al Qur'an kata daya di sebut sebagai "al-Quwwah", dalam berbagai variannya, disebut 33 kali. Dalam bahasa arab disebut "al-Quwwah", dalam bahasa Inggris disebut "empower" yang menurut Cornell University Empowerment Group dalam sleeby yang dikutip oleh Hatta Abdul Malik mengatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus-menerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi: saling menghormati , sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, yang melaluinya masyarakat uyang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Berarti mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivasi yang memenuhi pekerjaan mereka. Dengan demikian, berarti memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan gagasan baik dan mempunyai ketrampilan mewujudkan gagasannya menjadi realitas.

Kartasmita (1996: 144) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya

Sejalan dengan itu, Webster dalam Oxford English Dictionary (Sedarmayanti, 2000: 78) menjelaskan bahwa: Kata empower mengandung 2 arti. Pengertian pertama adalah to give power or authority to, dan pengertian kedua adalah to give ability to or enable to. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Pengertian pemberdayaan (Empowerment) menurut Carlzon & Macauley (Wasistiono, 1998: 46) adalah 'Membebaskan seseorang dari kendali yang kaku

dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya'

Menurut Wrihantnolo dan Dwidjowijoto (2007:2) pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukan sebuah proses instan, sebagai suatu proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu kesadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Selanjutnya Pranarka & Priyono (Dalam Sedarmayanti, 2000: 79) mengatakan bahwa pengertian pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, yaitu: (1) Pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. (2) Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Definisi tersebut menggambarkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang disengaja dan direncanakan secara terus menerus serta memiliki tujuan, yaitu mereka yang diberdayakan memiliki akses untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber yang ada.

7. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dan berhasil bila menggunakan strategi dan pendekatan yang tepat. Suharto (2005: 67) menyarankan 5 (lima) pendekatan, yaitu:

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal;
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya;
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah;
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya; dan
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Effendy (2002: 314-315) mengandung makna tiga pengertian yaitu enabling, empowering, dan maintaining sebagai berikut:

1. Enabling, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan bisnis yang berkesinambungan.
2. Empowering, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan skill dan kemampuan manajerial.
3. Maintaining, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.

Adapun menurut Kartasamita (1997: 13) dalam kerangka memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi, yakni:

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
3. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikandan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti; modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar, baik fisik seperti; irigasi, jalan, dan listrik, ataupun sosial seperti; sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya cukup minim. Untuk itu perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan bertanggungjawab, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi sosial dan penginte grasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

Disamping itu hal yang cukup penting adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan demokrasi.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Program Kampung Keluarga Berencana (KB).

No	Judul Penelitian	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Dusun Ambeng-Ambeng Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoardjo.	Nosa Arighi Bachtiyar dan Sri Wibawani (2017).	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	1. Perbedaan beberapa konsep penelitian 2. Pembahasan mengenai implementasi program kampung KB. 3. Perbedaan lokasi penelitian
2.	Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/ Keluarga Di Jawa Timur.	Mardiyono (2017).	1. Substansi judul yakni pemberdayaan kampung KB. 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	1. Meneliti pada aspek yang luas yakni di Jawa Timur 2. Perbedaan beberapa konsep penelitian
3.	Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Pada Kelompok Sasaran Keluarga Dengan Remaja di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk).	Arisqi Istiadi dan Hj.Weni Rosdiana. (2012).	1. Menggunakan metode penelitian yang sama.	1. Perbedaan Substansi judul 2. Perbedaan beberapa konsep penelitian 3. Studi pada kelompok sasaran keluarga dengan remaja 4. Perbedaan lokasi penelitian
4.	Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kabupaten Kuningan.	Siti Nunung Nurjannah dan Euis Susanti. (2018)	1. Meneliti program kampung KB.	1. Menggunakan metode penelitian mix-methode yaitu kuantitatif dan kualitatif. 2. Pembahasan mengenai implementasi program

				kampung KB. 3. Lokasi penelitian yaitu di kabupaten Kuningan
5.	Analisa Kontribusi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK. Jombang, Provinsi Jawa Timur	Agus Raikhai, Novy Setia Yunas, Linda Ratnasari, Iswari Hariastuti. (2017)	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif. 2. Regulasi dasar UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.	1. Substansi judul yakni Analisa Kontribusi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK. 2. Lokasi Penelitian 3. Teori yang digunakan

Sumber : Olahan Penulis 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa judul penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Program Kampung Keluarga Berencana. Ada beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti antara lain fokus penelitian yang akan diangkat dalam penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yaitu memfokuskan pada pemberdayaan terhadap Kampung Tualang Melalui Program Kampung Keluarga Berencana yang mana Kampung Tualang menjadi salah satu gugus tugas Kabupaten Siak dalam melaksanakan program Kampung Keluarga Berencana (KB) serta menjadi percontohan di Kabupaten Siak. Dengan demikian peneliti akan melihat bagaimana bentuk Pemberdayaan yang dilakukan dari berbagai sektor program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut.

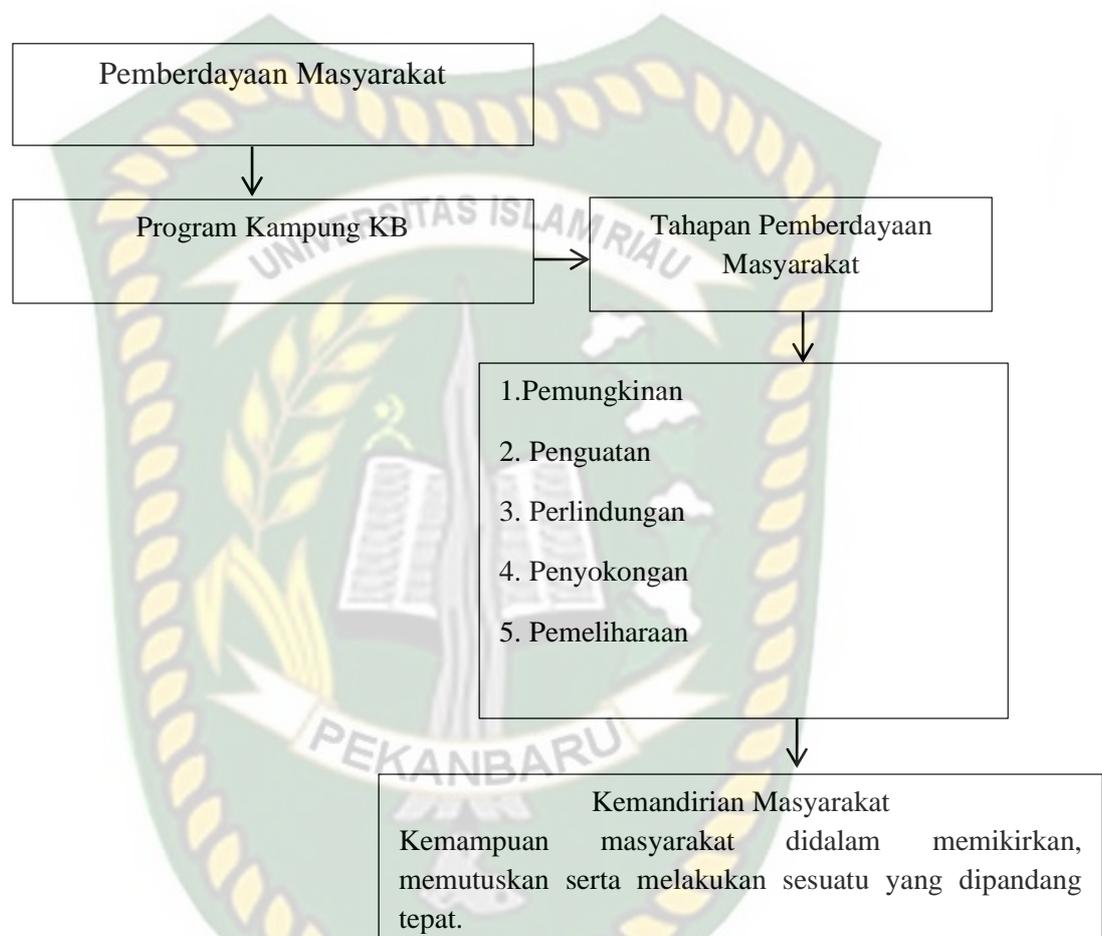
C. Kerangka Pikir

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas diatas serta pemaparan beberapa konsep yang telah mendukung penelitian ini yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung KB (Keluarga Berencana) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Kemudian diukur dengan teori yang dijadikan indicator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan unsur – unsur di dalam penelitian ini.

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar II.1 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak



Sumber : Modifikasi Penulis 2019, Menurut Teori Suharto (2005:67).

Dari Kerangka Pikir diatas dapat dilihat bahwasanya penelitian Pemberdayaan terhadap Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan teori Suharto (2005:67) yang mana didalam melakukan Pemberdayaan tersebut ialah memiliki tahapan-tahapan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Sehingga nantinya sebagai Outputnya ialah adanya Kemandirian Masyarakat.

D. Proposisi Penelitian

Proposisi adalah jawaban sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan Kerangka Berpikir tersebut, maka peneliti membuat proposisi penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan akan berhasil apabila melihat dimensi-dimensi yakni :

1. Pemungkinan
2. Penguatan
3. Perlindungan
4. Penyokongan
5. pemeliharaan

E. Konsep Operasional

Guna menghindari dari salahnya penafsiran mengenai konsep yang terdapat dalam peneliti ini, maka akan dijelaskan pula batasan terhadap konsep yang akan dioperasionalkan yang kemudian di uji melalui teknik pengukuran.

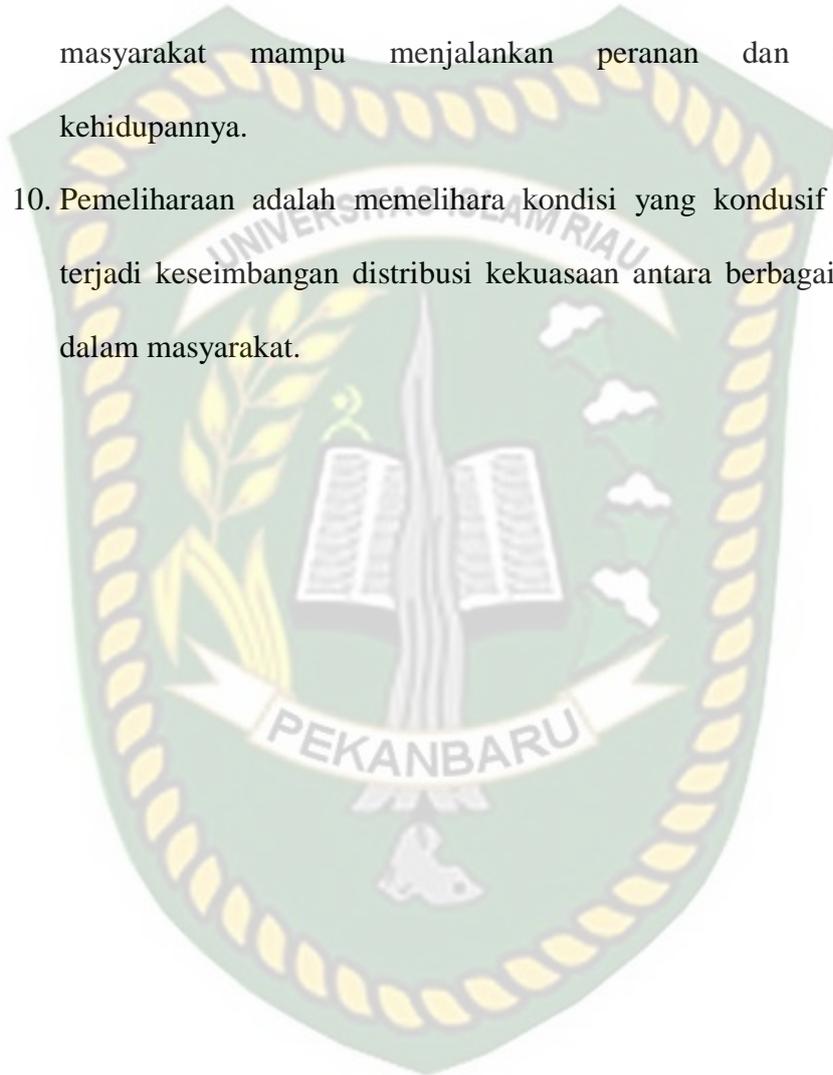
Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

2. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.
3. Kampung KB adalah Satuan wilayah setingkat desa, atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.
4. Program adalah kebijakan atau dalam hak ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai *“Whatever government choose to do or not to do”*. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu
5. Tahapan pemberdayaan adalah suatu siklus kegiatan pemberdayaan yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk merubah kearah yang lebih baik.
6. Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.
7. Penguatan adalah upaya memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
8. Perlindungan adalah upaya melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak

sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

9. Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
10. Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.



F. Operasional Variabel

Tabel II. 2 : Operasional Variabel Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Item penelitian
1	2	3	4
Suharto (2005: 59) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB).	<p>1. Pemungkinan</p> <p>2. Penguatan</p> <p>3. Perlindungan</p> <p>4. Penyokongan</p>	<p>a. Regulasi terkait jalannya program kampung KB</p> <p>b. Sumberdaya pendukung program</p> <p>a. Pemahaman pengetahuan masyarakat mengenai program kampung KB</p> <p>b. Sosialisasi yang diberikan dalam program kampung KB</p> <p>a. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)</p> <p>b. Jaminan program kampung KB terhadap hak-hak masyarakat</p> <p>a. Memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait</p>

		5. Pemeliharaan	<p>dengan Program Pemberdayaan Kampung KB</p> <p>b. Dukungan dari berbagai pihak terhadap jalannya program kampung KB.</p> <p>a. Hubungan yang tercipta dalam pelaksanaan program kampung KB</p> <p>b. Pelaksanaan program kampung KB yang kondusif</p>
--	--	-----------------	---

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.

Menurut Moleong (2008:6) mengemukakan bahwa kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupten Siak. Alasannya di Kampung Tualang karena berkaitan dengan program Kampung KB (Keluarga Berencana) Kampung Tualang sudah di canangkan oleh Bupati Kabupaten Siak pada tahun 2016 untuk ikut serta dalam melaksanakan program Kampung KB (Keluarga Berencana).

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku atau orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi. Maka, dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian ini meliputi:

Tabel. III.1 Informan penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1	Drs. H. Arfan Usman, M.Pd	Kepala Dinas DP2PPKB Kabupaten Siak	Strata 2 (S2)	Sebagai informan
2	Juprianto S.Sos, M.IP	Penghulu Kampung Tualang	Strata 2 (S2)	Sebagai informan
3	Fatmawati, S.Sos	Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	Strata 1 (S1)	Sebagai informan
4	Seniwati	Kader	SMA	Sebagai informan
5	Bainarmi	Seksi Operasional Rumah Data Kependudukan Kampung KB Tualang	SMA	Sebagai Informan
6	Amril Teguh	Tokoh Masyarakat	SMA	Sebagai Informan
7	Susanti	Masyarakat	SMA	Sebagai Informen

D. Teknik Penarikan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan asas dasar subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informasi ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan lainnya adalah bahwa jumlah sampel yang dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian serta sampel yang sudah memberikan jawaban penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

1. Data primer

Menurut Iskandar (2008;252), data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan responden tentang bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. Data sekunder

Menurut Iskandar (2008;253), data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahannya terhadap dokumen

pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan focus permasalahan penelitian). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literature buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis serta data-data yang lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya. Data-data yang dimaksud seperti :

1. Petunjuk teknis program Kampung KB
2. Panduan monitoring dan evaluasi program Kampung KB
3. Pedoman pengelolaan Kampung KB
4. Jumlah penerima program Kampung KB
5. Profil Kampung Tualang
6. Data pendukung lainnya

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moloeng (2008:58) teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Teknik Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah

diketahui sebelumnya. Penulis memilih teknik ini karena penulis ingin melihat fakta yang terjadi dilapangan sehingga penulis mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

- b. Teknik Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Penulis menggunakan teknik interview (wawancara) agar dapat berkomunikasi langsung dengan mewawancarai objek yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkompeten terkait fenomena yang terjadi karena langsung dari sumber terpercaya.
- c. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya. Teknik ini dapat memudahkan penulis dalam membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung ke lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (dalam Moloeng, 2008:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

H. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi penulis mengelompokkan dalam 6 (enam) bab yang mana masing-masing bab digambarkan secara umum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini diuraikan tentang studi kepustakaan, kerangka pikir, konsep operasional, dan operasional variabel

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan aktivitas yang dilakukan

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil ini akan dibahas tentang deskripsi data serta pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Siak

Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

Pada tahun 2000, penduduk Kabupaten Siak tercatat 238.786 ribu jiwa. Dalam waktu 5 tahun kemudian, penduduk Kabupaten Siak menjadi 309.845 jiwa (2005). Dari tahun 2010-2005 penduduk Kabupaten Siak menaik drastis sekitar 71.059 jiwa. Dan Hasil SP2010 penduduk Kabupaten Siak berkembang 377.200 jiwa. Dapat diketahui jika laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak dari tahun 2000-2010 sekitar 4,29 persen/tahun.

1. Gambaran Umum Letak Geografis Kabupaten Siak

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" — 00 20' 49" Lintang Utara dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah

negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia - Malaysia - Singapura. Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dan tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar.

Selain Sungai Siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buntan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas dan Tasik Rawa. Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan

basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan bulan kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi ke arah Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat wilayah Provinsi Riau.

2. Penduduk Kabupaten Siak

Pada tahun 2000, penduduk Kabupaten Siak tercatat 238.786 ribu jiwa. Dalam waktu 5 tahun kemudian, penduduk Kabupaten Siak menjadi 309.845 jiwa (2005). Dari tahun 2005-2010 penduduk Kabupaten Siak menaik drastis sekitar 71.059 jiwa. Dan Hasil SP2010 penduduk Kabupaten Siak berkembang 377.200 jiwa. Dapat diketahui jika laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Siak dari tahun 2000-2010 sekitar 4,29 persen/tahun.

Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah Kecamatan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : Kecamatan Bunga Raya 20.900 Jiwa, Kecamatan Dayun 26.600 Jiwa, Kecamatan Kandis 58.700 Jiwa, Kecamatan Kerinci Kanan 22.900 Jiwa, Kecamatan Koto Gasip 18.600 Jiwa, Kecamatan Siak 21.400 Jiwa, Kecamatan Sabak Auh 9.900 Jiwa, Kecamatan Tualang 104.000 Jiwa, Kecamatan Minas 25.800 Jiwa, Kecamatan Sungai Apit 25.000 Jiwa, Kecamatan Pusako 5.100 Jiwa, Kecamatan Lubuk Dalam 17.000 Jiwa, Kecamatan Sungai Mandau 7.200 Jiwa, Kecamatan Mempura 14.100 Jiwa. Batas Wilayah Administrasi sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, dibeleah Barat berbatasan dengan

Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru sedangkan disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Sejarah Singkat Kampung Tualang

Tualang yang menurut asal katanya adalah Tuah Alang, merupakan salah satu Kecamatan bagian dari Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kecamatan Tualang ini terletak di wilayah kabupaten siak Provinsi Riau yang lokasinya berjarak 60km dari kota Pekanbaru. Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari kecamatan Siak yang dimekarkan menjadi 14 Kecamatan yaitu, Kecamatan Siak, Kerinci kanan, Tualang, Dayun, Sungai Apit, Minas, Kandis, Mempura, Sabak Auh, Bunga Raya, Koto Gasib, Mandau, Pusako dan Lubuk Dalam.

Letak geografis Kecamatan Tualang adalah 032' - 051' Lintang Utara dan 101028' - 101052' Bujur Timur dengan luas keseluruhan 373,75 KM² Bujur Timur. Kecamatan Tualang terdiri dari delapan Desa dan satu kelurahan yaitu tualang, tualang timur, pinang sebatang, pinang sebatang timur, pinang sebatang barat, maredan, maredan barat, perawang barat, dan kelurahan perawang.

Sebelum Tualang menjadi suatu kecamatan, daerah ini masih tergabung dengan kecamatan siak dan kabupaten bengkalis, Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan industri membuat daerah ini menjadi tujuan bagi perantau dari berbagai daerah yang tentunya menjadi pesat pula pertumbuhan penduduknya sehingga menurut pemerintah pusat, daerah ini layak untuk dimekarkan menjadi beberapa desa. Diantara delapan desa dan satu kelurahan ini, desa Tualanglah yang paling padat penduduknya, berdasarkan data dari Badan

Pusat Statistik, penduduk desa tualang berjumlah sekitar enam belas ribu empat ratus jiwa dengan tiga ribu lima ratus kepala keluarga, yang didominasi oleh perantau dari berbagai daerah, persentase penduduk tempatan dengan penduduk perantau berkisar antara 30% berbanding 70%. (BPS Kab Siak, profil kecamatan Tualang Tahun 2013).

Saat ini di Kabupaten Siak suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala Desa telah berganti Nomenklaturnya dari Desa menjadi Kampung, Sebutan Kepala Desa berganti menjadi Penghulu, Hal ini diatur oleh Pemkab Siak tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 “ Pemkab Siak sebagai daerah yang berakar kuat pada budaya melayu sejak zaman kerajaan Siak ingin melestarikan kembali Budaya Melayu dimasa lalu yang saat ini mulai hilang akibat perkembangan zaman,”. Terbentuknya Kampung Tualang sebagai institusi yang berperan menjalankan roda Pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis, yang merupakan bentuk suatu Kampung yang bermanfa’at mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara pemerintahan dengan rakyat yang diperintahnya.

Kampung Tualang yang posisi wilayahnya yang menyebar, yang kurang lebih jaraknya 11 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Tualang yang dapat ditempuh melalui darat. Kampung Tualang merupakan Kampung Induk yang telah 2 (dua) kali dimekarkan, Pertama pada Tahun 2002 Kampung Tualang dimekarkan menjadi 2 Kampung dan 1 kelurahan, yang terdiri dari 3 dusun dan 9 RW yaitu, Dusun Surya, Dusun Merbau dan Dusun Sukadamai berdasarkan Perda

Nomor 4 Tahun 2002 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Siak dan Pemekaran yang kedua pada Tahun 2013 yang menjadi Kampung Tualang Timur, Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta untuk mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan Kampung.

Dengan demikian, potensi yang ada di Kampung Tualang ini secara tidak langsung terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan Kampung lama sebelum otonomi Daerah ditetapkan.

1. Demografi Kampung Tualang

a) Batas Wilayah Kampung

Letak geografi Kampung Tualang , terletak diantara :

Sebelah Utara : Kampung Pinang Sebatang
 Sebelah Selatan : Kampung Meredan/Meredan Barat
 Sebelah Barat : Kelurahan Perawang
 Sebelah Timur : Kampung Tualang Timur

b) Luas Wilayah Kampung

1. Pemukiman	:	122	ha
2. Pertanian Sawah	:	162,5	ha
3. Ladang/Tegalan	:	161	ha
4. Hutan	:	-	ha
5. Rawa-rawa	:	-	ha
6. Perkantoran	:	0,25	ha
7. Sekolah	:	0,75	ha
8. Jalan	:	80	ha
9. Lapangan sepak bola	:	2	ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota Kecamatan terdekat : 11 KM
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 55 KM
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 Jam

d) Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kampung Tualang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dusun	Lk	Pr	Lk	Jlh KK
1	Surya	1.552	1.515	3.067	589
2	Mulyabaru	1.432	1.393	2.825	511
3	Merbau	1.607	2.047	3.654	713
4	Sukadamai	3.139	3.155	6.294	1.261
Jumlah		7.730	8.110	15.840	3.074

Sumber : Laporan Kependudukan Kampung Tualang Tahun 2019.

2. Visi dan Misi Kampung Tualang

1) Visi :

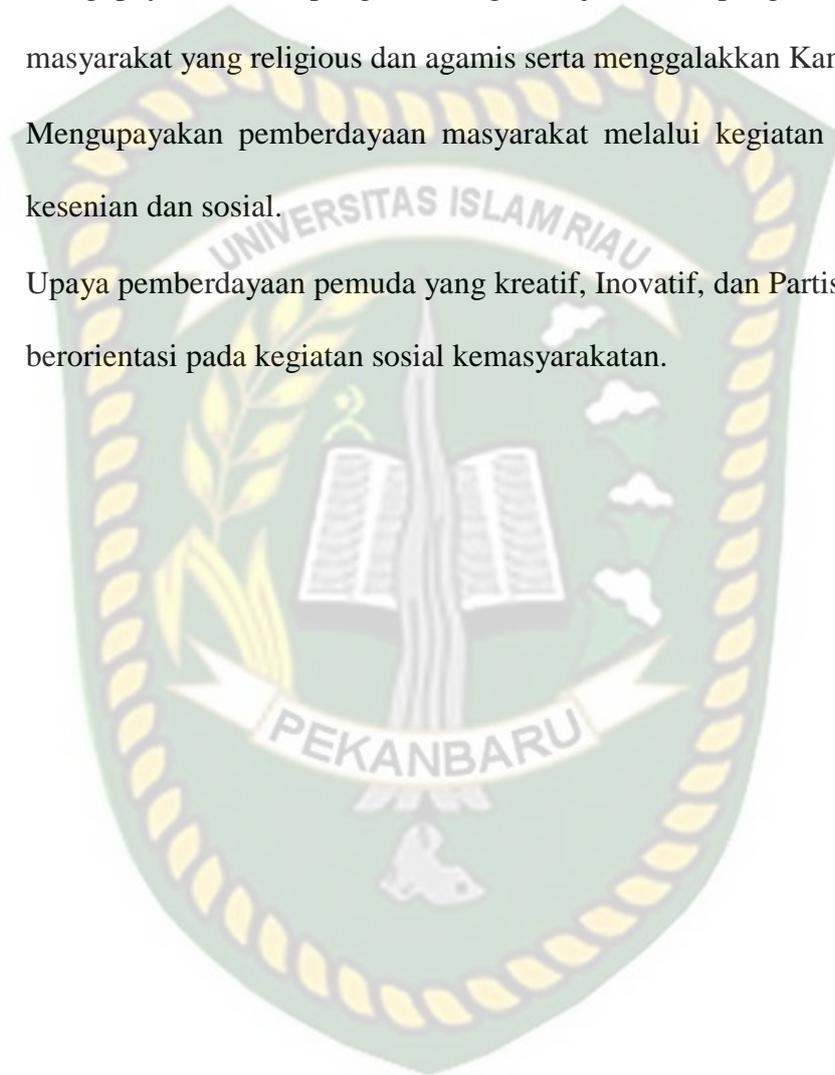
Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Aman, sejahtera dan Sakinah.

2) Misi :

Guna mencapai Visi diatas maka ditetapkan Misi Desa Tualang yang meliputi :

- Upaya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar.
- Upaya mewujudkan Usaha Ekonomi Kreatif dan Usaha kecil menengah.
- Mengupayakan peningkatan Infrastruktur pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai.

- Upaya pemberdayaan Petani, Peternak dan nelayan yang berkesinambungan dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
- Mengupayakan Kampung Tualang menjadi Kampung Sakinah dan masyarakat yang religious dan agamis serta menggalakkan Kamtibmas.
- Mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Olah raga, kesenian dan sosial.
- Upaya pemberdayaan pemuda yang kreatif, Inovatif, dan Partisipatif yang berorientasi pada kegiatan sosial kemasyarakatan.

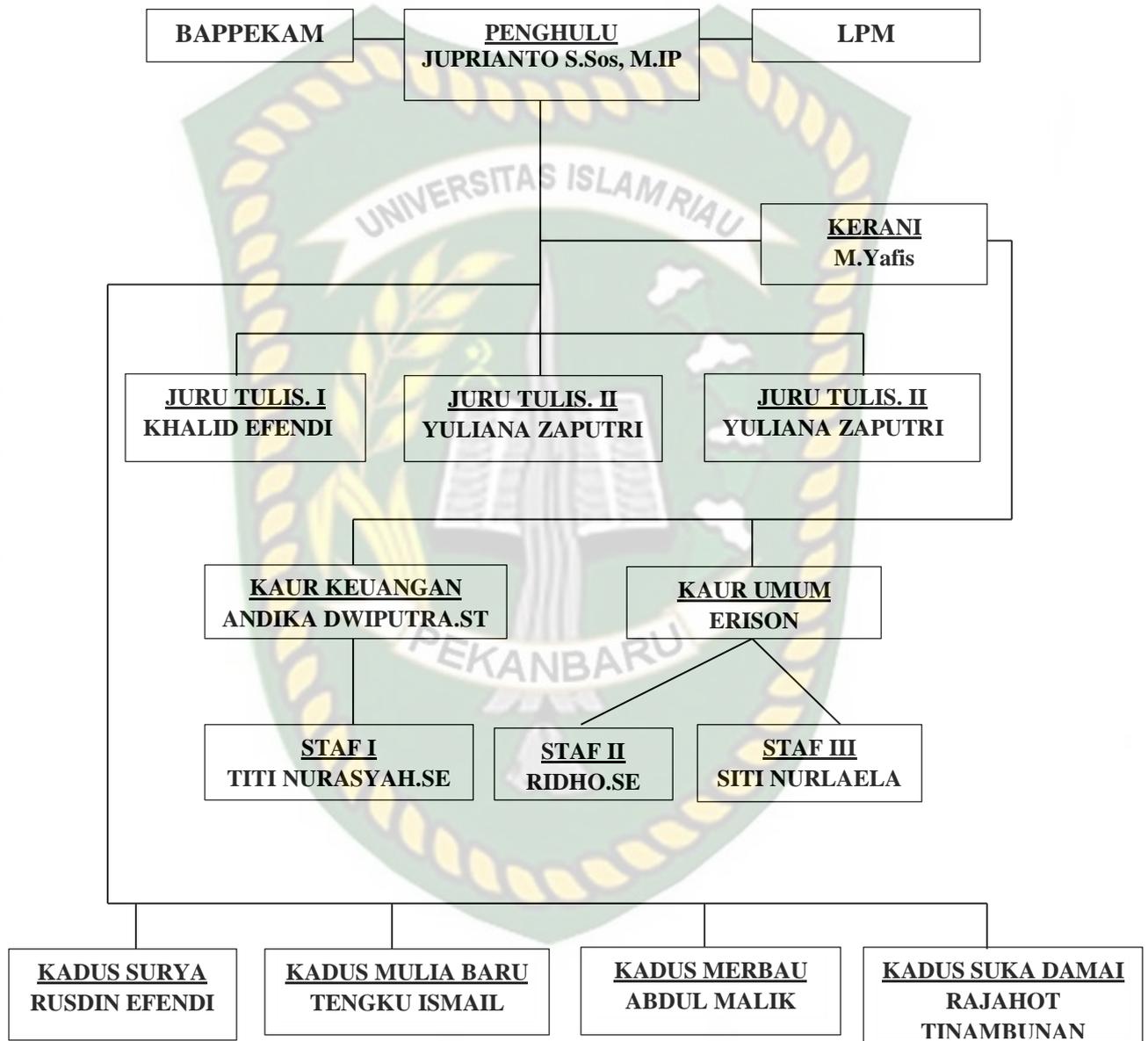


Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

3. Struktur Pemerintahan Kampung Tualang Periode 2017-2023

Gambar IV.1 Struktur Pemerintahan Kampung Tualang



Sumber : Profil Kampung Tualang 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dimana untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

A. Identitas Informan

Sebelum masuk kepada substansi hasil penelitian dan pembahasan, terlebih dahulu penelitian memaparkan identitas responden sebagai sumber memperoleh data dan informasi, dan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang original serta data dan informasi benar-benar diperoleh sesuai dengan realita lapangan. Identitas responden tersebut adalah sebagai berikut.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelas mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Sampel (orang)	Persentase
1	Laki-laki	3	20%
2	Perempuan	4	80%
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari data di atas dapat diketahui responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. Dikarenakan sampel penelitian dari kampung Tualang ini, kepala desa Tualang yang pengurus atau anggota adalah laki' dan perempuan.

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Usia merupakan salah satu faktor yang dominan mempengaruhi pola pikir seseorang, semakin tinggi usia seseorang pola pikir akan semakin dewasa dan akan mempengaruhi data dan informasi yang diberikan. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Usia responden	Sampel (orang)	Persentase %
1	25-35	1	10%
2	36-45	6	90%
3	46-60	-	-
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Melalui tabel di atas dapat diketahui responden yang berusia 25-35 tahun sebanyak 1 orang atau lebih kurang 10% sedangkan responden berusia 36-45 tahun sebanyak 6 orang atau lebih kurang 90%. Usia responden sebagaimana yang telah di jelaskan di atas berada pada kategori baik dan rata-rata sudah memiliki pengalaman dalam memberikan data dan informasi yang valid dan objektif.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. pendidikan yang pernah ditempuh oleh seseorang cenderung mempengaruhi pola pikir dan kepribadian, kemampuan, dan wawasan seseorang.

Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin luas pula wawasan dan pengetahuan yang dimilikinya yang sangat berpengaruh baik jasmani maupun rohani yang berlangsung seumur hidup baik didalam maupun diluar sekolah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia . berdasarkan hasil penelitian di lapangan terlihat tingkat pendidikan informan adalah sebagai berikut :

Tabel V. 3 : Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

	Tingkat pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S2	2
2	S1	1
3	SMA	4
	Jumlah	7

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020

Dari tabel di atas terlihat data responden, dapatlah diketahui pendidikan dari masing-masing responden, responden yang berpendidikan S2 sebanyak 2 orang, yang berpendidikan S1 sebanyak 1 orang, yang berpendidikan SMA sebanyak 4 orang.

B. Hasil Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Hasil penelitian ini berisi hasil wawancara dari informan yang berasal dari “Kepala bidang Keluarga Berencana Kabupaten Siak”, “Penghulu Kampung Tualang”, “Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kampung Tualang”, serta “Masyarakat Kampung Tualang”. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari lima indikator yang meliputi Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan yang bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat menurut Suharto (2005: 67) yang mana terdapat indikator-indikator sebagai berikut:

1. Pemungkinan
2. Penguatan
3. Perlindungan
4. Penyokongan
5. Pemeliharaan

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada 7 orang informan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan sesuai judul peneliti.

1. Indikator Pemungkinan

Pemungkinan adalah menciptakan kondisi atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Tujuannya agar masyarakat mampu mandiri dan berwawasan. Tentunya kondisi atau iklim yang diciptakan disini seperti adanya regulasi yang mengatur dan mendukung terkait dengan jalannya program kampung KB sehingga nantinya mampu meningkatkan potensi yang ada di masyarakat melalui bentuk-bentuk program yang dijalankan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dan juga sumberdaya pendukung program serta pendekatan-pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Drs. Arfan Usman, M.Pd Selaku kepala dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak mengenai indikator Pemungkinan, beliau menjelaskan bahwa :

“Tentunya regulasi itu telah ada dari pusat langsung karena ini adalah program pusat yaitu Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar pelaksanaan program keluarga berencana. Kabupaten tinggal menjalankan apa yang telah diperintahkan dari pusat sehingga nanti dapat dikembangkan lagi di masing-masing kampung yang menjadi sasaran program kampung kb ini dan tentunya melalui bentuk-bentuk program yang dijalankan karena program kampung kb ini sangat luas pengertiannya tidak hanya sebatas program kb saja namun juga dengan

memberdayakan masyarakatnya melalui kampung sehingga masyarakat mampu menggali potensi yang ada serta mandiri.”(Wawancara, Jumat 21 Agustus 2020 Pukul 08.30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menjalankan program Kampung KB sesuai dengan perintah dari pusat. Karena sudah adanya regulasi yang mengtur terkait dengan jalannya program kampung KB ini yakni Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menjadi dasar program Kampung KB. Sehingga dari regulasi tersebut dapat dikembangkan di masing masing kampung yang menjadi sasaran program kampung KB melalui bentuk-bentuk program yang dijalankan.

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama Bapak Juprianto S.Sos, M.IP Selaku Penghulu Kampung Tualang, beliau menjelaskan bahwa :

“Untuk regulasi itu langsung dari pusat sehingga kami yang berada dikampung Tualang ini tinggal menjalankan saja sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan yang nantinya dituangkan dalam bentuk-bentuk program melalui berbagai sektor seperti sektor keagamaan, pendidikan, reproduksi, ekonomi, perlindungan, kasih sayang, sosial budaya, dan pembinaan lingkungan .”(Wawancara, Selasa 24 Agustus 2020 Pukul 07.30 WIB)

Dari hasil wawancara bersama Penghulu Kampung Tualang bahwa kampung tualang juga sudah menjalankan program Kampung KB ini sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pusat sehingga terciptalah bentuk-bentuk program dari berbagai sektor yang ada yakni seperti sektor keagamaan, pendidikan, reproduksi, ekonomi, perlindungan, kasih sayang, sosial budaya, dan

pembinaan lingkungan sehingga masyarakat mampu menggali potensi yang dimilikinya.

Dalam menjalankan program Kampung KB ini tentunya perlu adanya pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan kepada masyarakat. Dari wawancara bersama ibu Fatmawati, S.Sos selaku Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Tualang beliau mengatakan bahwa :

“Tentunya kita didalam menjalankan program kampung kb ini terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat terutama kepada tokoh-tokoh masyarakat baik itu tokoh agama dan juga kepada Bintara Pembina Desa (BABINSA) dan pihak kepolisian dengan cara menjelaskan program serta tujuan dilankannya program sehingga program kampung KB ini dapat diketahui dan disepakati oleh semua pihak.”(Wawancara, Senin 23 Agustus 2020 Pukul 09.30 WIB)

Sedangkan dari hasil wawancara bersama ibu Seniwati selaku kader PLKB mengatakan bahwa:

“Biasanya sebelum kami menjalankan bentuk program yang telah ditetapkan itu kami langsung turun kelapangan guna mlakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga sesuai nantinya antara bentuk program dengan kebutuhan masyarakat serta juknis dari program itu sendiri. Intinya ada kesesuaian lah nantinya dengan yang juga kita harapkan.” (Wawancara, Rabu 13 Oktober 2020 Pukul 10.30 WIB)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Kampung Tualang sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada berbagai pihak sehingga program kampung KB ini dapat diterima oleh semua pihak serta berjalan sesuai dengan yang diharapkan melalui bentuk-bentuk program yang dijalankan.

Dari hasil wawancara bersama ibu Beinarmi selaku Seksi Operasional Rumah Data Kependudukan Kampung Kb Tualang Mengatakan Bahwa:

“Kalau melakukan Pendekatan itu pasti ada kan sudah ada juknisnya jadi kita tinggal malaksanakan tugas sesuai dengan juknis tersebut. Nantinya akan dikoordinasikan langsung oleh PLKB nya jadi ketika didalam memberikan penyuluhan itu gampang karna diawal sudah dilakukan berbagai pendekatan.” (Wawancara, Senin 11 Oktober 2020 Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sudah dilakukannya koordinasi oleh PLKB didalam melakukan pendekatan kepada masyarakat sebelum program itu dijalankan, tentunya sesuai juknis yang telah ditetapkan. Sehingga nantinya bentuk program tersebut akan tepat sasaran dan sesuai dengan yang telah diharapkan.

Dalam menjalankan program Kampung KB ini juga perlu memperhatikan sumberdaya pendukung program baik itu dari manusianya ataupun dari fasilitas pendukung program. Dari wawancara bersama bapak Amril Teguh selaku tokoh masyarakat Kampung Tualang mengatakan bahwa :

“Fasilitas yang ada di kampung kb sudah cukup baik seperti sudah adanya balai kampung kb yang mana dibalai itulah tempat pertemuan sosialisasi serta pelatihan sehingga bisa dikatakan mendukung terhadap program yang dijalanka .”(Wawancara, Selasa 24 Agustus 2020 Pukul 13.30 WIB)

Sedangkan dari wawancara bersama ibu Susanti selaku masyarakat Kampung Tualang mengatakan :

“Untuk sumberdaya pendukung mungkin sudah baik karena kalau yang saya lihat sekarang sudah ada balai kalau dulu belum ada, namun yang menjadi masalah tempat didirikannya balai cukup jauh dari tempat masyarakat sehingga kami terkadang juga tak hadir kalau ada pertemuan karena selain banyak juga yang mau diurus dirumah juga mengingat lokasi balai yang cukup jauh.”(Wawancara, Selasa 24 Agustus 2020 Pukul 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara bersama masyarakat diatas, maka dapat dilihat bahwa Kampung KB sudah memiliki fasilitas pendukung yang cukup baik

didalam menjalankan program kampung KB. Ini terlihat dengan sudah adanya balai pertemuan di kampung KB sehingga dapat menunjang kelancaran didalam menjalankan program kampung KB di Kampung Tualang. Namun lokasi tempat berdirinya balai ini cukup jauh dengan kampung Tualang sehingga mengurangi minat masyarakat untuk hadir dalam pertemuan atau sosialisasi yang dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Pemungkinan, penulis menyimpulkan bahwa sudah adanya regulasi yang telah ditetapkan langsung dari pusat mengenai Program kampung Kb tersebut yakni Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan program Keluarga Berencana. Sehingga Kampung tinggal menjalankan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh pusat tersebut dengan melakukan berbagai bentuk-bentuk program yang akan dilaksanakan.

Serta sebelum bentuk Program itu dijalankan melalui PLKB sudah melakukan berbagai pendekatan kepada masyarakat serta tokoh-tokoh yang ada dimasyarakat agar bentuk program yang dijalankan tersebut dapat diterima dan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan dan tepat sasaran. Namun dari observasi yang telah peneliti lakukan peneliti juga melihat bahwasanya masyarakat banyak mengeluhkan bahwa tempat atau lokasi penyuluhan Kampung Kb tersebut terletak cukup jauh sehingga masyarakat mengeluhkan keberadaan tempat penyuluhan itu dan tidak sedikit masyarakat yang tidak ikut serta didalam pelaksanaan penyuluhan tersebut.

Seharusnya lokasi tempat didirikannya penyuluhan tersebut haruslah dekat lokasi tempat tinggal masyarakat sehingga akan memudahkan masyarakat untuk hadir jika ada pemberian penyuluhan maupun pelatihan kepada masyarakat. Sehingga yang peneliti lihat disini antara PLKB dengan Penghulu sebagai ketua Kampung Kb Tualang ini belum betul-betul melakukan koordinasi yang jelas terkait dengan dijalankannya program Kampung Kb tersebut. Atau dapat dikatakan Kampung Kb belum betul-betul siap dalam menjalankan Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kb. Sedangkan program Kampung Kb sendiri bertujuan untuk memberdayakan masyarakat menjadi berkualitas namun nyatanya sumberdaya pendukung Program belum berjalan dengan baik.

2. Indikator Penguatan

Penguatan disini ialah memperkuat pengetahuan dan kemampun yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dari wawancara Bersama bapak Drs.Arfan Usman M.Pd selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak, mengatakan bahwa :

“Sebenarnya yang sangat penting dan perlu dilakukan itu membangun pemahaman masyarakat terlebih dahulu agar mereka memahami betul-betul program ini, ya tentunya dengan melakukan sosialisasi yang harus dilaksanakan minimal 3 bulan sekali, kami telah memerintahkan agar disetiap kampung itu melaksanakan sosialisasi secara bertahap minimal 3 bulan sekali sehingga masyarakat itu betul-betul memahami bentuk program dan tujuan dijalankannya program kampung KB ini.”
(Wawancara, Jumat 21 Agustus 2020 Pukul 08.30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

telah memerintahkan bahwa setiap kampung/desa harus melakukan sosialisasi mengenai program Kampung KB ini minimal dilakukan 3 bulan sekali agar dapat membangun pemahaman masyarakat mengenai program kampung KB tersebut.

Dari hasil wawancara Bersama Bapak Juprianto S.Sos, M.IP selaku Penghulu Kampung Tualang, beliau mengatakan :

“Sejauh ini Kampung Tualang rutin mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat berkenaan dengan program Kampung KB ini terutama slogan 2 anak lebih baik dan tentunya agar masyarakat mampu memahami dan tau program kampung KB ini sekaligus kami juga adakan pelatihan-pelatihan di kampung Tualang ini bahkan sampai dengan acara-acara khusus seperti perlombaan-perlombaan di kampung Tualang.” (Wawancara, Selasa 24 Agustus 2020 Pukul 07.30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa memang sejsuh ini Kampung Tualang telah melakukan sosialisasi terhadap program Kampung KB ini bahkan juga mengadakan pelatihan-pelatihan serta perlombaan didalam menjalankan program kampung KB ini, dapat dilihat juga bahwa sebenarnya program Kampung KB ini sangat luas pengertiannya hingga memberdayakan masyarakat dan juga kampungnya agar mandiri dan sejahtera.

Berikut ini kutipan wawancara bersama Ibu Fatmawati S.Sos selaku Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kampung Tualang yaitu sebagai berikut:

“Untuk sosialisasi itu kami membaginya dalam 3 kegiatan yang pertama itu kami mengadakan Musyawarah Kampung KB yang terlibat disini seperti RT/RW setempat berkenaan dengan jalannya program Kampung KB, yang kedua itu kami mengadakan Rapat Kerja Kampung KB yang terlibat disini orang yang ada di struktur Kampung KB atau seksi-seksi yang telah ditugaskan, yang ketiga itu Sosialisai Program Kampung KB

serta pelatihan kepada masyarakat Kampung Tualang langsung seperti pemakaian alat kontrasepsi serta pengenalan berbagai hal tentang program Kampung KB ini.”(Wawancara, Senin 23 Agustus 2020 Pukul 09.30 WIB)

Sedangkan dari hasil wawancara bersama ibu Seniwati selaku kader PLKB mengatakan bahwa:

“Pasti ada sosialisai yang dilakukan agar masyarakat mampu memahami nantinya program yang akan dijalankan melalui Program Kampung Kb ini. karna harus kita pastikan dulu bahwa nantinya program ini betul-betul dapat meningkatkan mutu masyarakat. Biasanya dalam sosialisasi itu kami lakukan 3 bulan sekali menyangkut kegiatan yang akan dilaksanakan dan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan.” (Wawancara, Rabu 13 Oktober 2020 Pukul 10.30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan juga kader Kampung Tualang telah melakukan sosialisasi serta pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat mampu memahami dan memperkuat pengetahuan dan kemampuan didalam program Kampung KB.

Dari hasil wawancara bersama ibu Beinarmi selaku Seksi Operasional Rumah Data Kependudukan Kampung Kb Tualang Mengatakan Bahwa:

“Yang saya tahu bentuk penerarahan dan pelatihan terhadap program Kampung Kb ini biasanya pemberian pengarahan melalui sosialisasi bagaimna kegiatan atau bentuk program yang dijalankan itu dapat dimengerti oleh masyarakat seperti pengarahan dalam hal maaf cara memakai alat kontrasepsi yang baik dan juga pengarahan atau pelatihan yang menyangkut dengan bentuk program masing-masing seksi yang telah ditetapkan kalau dalam seksi ekonomi itu contohnya pelatihan berupa meningkatkan kreativitas yang ada dimasyarakat seperti kerajinan tangan yang sudah ada dikampung kita ini sehingga nantinya akan mampu meningkatkan ekonomi yang ada dimasyarakat melalui produk-produk kampung.” (Wawancara, Senin 11 Oktober 2020 Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya sosialisasi sudah dilakukan terkait dengan program Kampung Kb tersebut dan dilaksanakan 3 bulan

sekali. Kegiatan pelatihan atau pengarahan tersebut seperti pemakaian alat kontrasepsi serta dalam bidang lain seperti seksi ekonomi membuat kerajinan tangan sehingga dapat meningkatkan potensi yang ada dimasyarakat dan kualitas serta kemajuan dari Kampung itu sendiri.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada Bapak Amril Teguh sebagai Tokoh Masyarakat Kampung Tualang yaitu sebagai berikut:

“Yang saya lihat sejauh ini masyarakat Tualang ini masih belum betul-betul memahami program Kampung KB ini dan bahkan kurang minat, karena setiap diadakan sosialisasi saja hanya sedikit sekali yang datang, dan saya juga beranggapan bahwa sebenarnya program KB ini sah-sah saja namun seperti pepatah lama bilang Banyak Anak Banyak pula rezeki kita itu tak salah juga, ya mungkin motivasi itu masih kurang sehingga masyarakat kita ni masih acuh tak acuh bahkan masih ada yg tak tau program kampung KB ni ada dikampung Tualang.” (Wawancara, Selasa 24 Agustus 2020 Pukul 13.30 WIB)

Sedangkan dari wawancara bersama Ibu Susanti sebagai masyarakat Kampung Tualang, beliau mengatakan :

“Memang benar sosialisasi itu ada tetapi saya pun hadir sesekali saja karena kadang yang ikut sosialisasi cuma itu ke itu saja orangnya sedikit sekali jadi kadang saya malas juga mau pergi, mungkin itu juga alasan teman yang lain tak mau pergi ditambah lagi saya pun kurang paham sebenarnya Program Kampung KB ini banyak betul prosedurnya.” (Wawancara, Selasa 24 Agustus 2020 Pukul 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara bersama Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Kampung Tualang dapat dilihat bahwa masyarakat Kampung Tualang masih banyak yang belum mengetahui dan memahami tentang program Kampung KB ini. Terbukti dengan kurang minatnya masyarakat untuk hadir sosialisasi ataupun pelatihan yang diadakan di Kampung Tualang. Karena Masyarakat pun masih banyak beranggapan bahwa banyak anak itu banyak rejeki.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Penguatan penulis menyimpulkan bahwa dari segi penguatan memang sudah dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat dengan melakukan pengarahan serta pelatihan terkait dengan program Pemberdayaan Kampung Kb tersebut oleh PLKB maupun kader yang dilaksanakan 3 bulan sekali dengan berbagai kegiatan.

Namun yang penulis lihat bahwa dalam sosialisasi yang telah dilakukan tersebut hanya sedikit masyarakat yang ikut serta didalam pemberian sosialisasi tersebut. dan juga masih ada masyarakat yang kurang memahami bahkan sampai tidak mengetahui Program Kampung Kb tersebut dijalankan di kampung mereka yakni Kampung Tualang. sosialisasi yang dilakukan hanya dihadiri oleh masyarakat dalam jumlah sedikit dengan orang yang itu-itu saja. Peneliti melihat disini bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat didalam Program Kampung Keluarga Berencana tersebut.

Dalam hal ini tentunya PLKB yang bertugas memberikan sosialisasi haruslah mampu meningkatkan kesadaran yang ada dimasyarakat terhadap program Kampung Kb ini sehingga masyarakat mampu memahami betul-betul program kampung Kb tersebut serta masyarakat juga dapat hadir menyeluruh dalam pemberian sosialisasi tersebut. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam indikator Penguatan ini belum berjalan dengan baik masih banyaknya masyarakat yang belum memahami program Kampung Kb tersebut.

Dapat dilihat juga disini bahwa kurangnya motivasi yang diberikan PLKB terhadap masyarakat terbukti masih sedikit masyarakat yang hadir dalam

pemberian sosialisasi terhadap Program Kampung Kb tersebut. Seharusnya PLKB mampu memberikan motivasi yang lebih agar masyarakat lebih termotivasi untuk hadir dalam sosialisai tersebut. Sehingga sosialisasi yang diberikan dapat menyeluruh kepada semua masyarakat kampung Tualang.

3. Indikator Perlindungan

Perlindungan disini ialah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Drs. Arfan Usman M.Pd Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak, mengatakan:

“Tentunya program kampung KB ini menjamin adanya bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat. Biasanya didesa itu telah ada organisasi-organisasi khusus seperti satuan tugas (SATGAS) yang ditugaskan melindungi jika ada permasalahan antar masyarakat yang terjadi disuatu desa tersebut dan tentunya telah bekerja sama dengan pihak-pihak kepolisian. Jadi menurut saya program kampung KB ini memang betul-betul suatu bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat.”(Wawancara, Jumat 21 Agustus 2020 Pukul 08.30 WIB)

Dari hasil wawancara bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak dapat dilihat bahwasanya memang telah ada organisasi-organisasi khusus di suatu desa yang ditugaskan langsung untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki suatu masalah tertentu.

Berikut adalah wawancara Bersama Bapak Juprianto S.IP, M.Si Selaku Penghulu Kampung Tualang, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk jaminan bahwa program kampung Kb ini menjamin terhadap hak-hak yang ada dimasyarakat menurut saya sangat menjamin sebab program kampung Kb ini juga memperhatikan hak-hak yang ada dimasyarakat yakni hak masyarakat mendapatkan perlindungan, program kampung KB ini juga memiliki seksi perlindungan yang bertugas melindungi masyarakat kampung jika ada terjadi suatu masalah.” (Wawancara, Selasa 24 Agustus 2020 Pukul 07.30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Program Kampung KB tersebut juga sudah menjamin hak-hak yang ada dimasyarakat sebagai buktinya pada program Kampung Kb tersebut memiliki seksi Perlindungan yang ditugaskan langsung untuk melindungi masyarakat jika ada masalah yang terjadi dimasyarakat.

Berikut ini kutipan wawancara bersama Ibu Fatmawati S.Sos selaku Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kampung Tualang yaitu sebagai berikut:

“Kalau untuk Kecamatan Tualang itu setiap desa sudah membentuk Satgas KDRT (Satuan Tugas Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang mana Satgas tersebut telah bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) serta Pihak Kepolisian. Jadi, kalau ada terjadi masalah seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu kita langsung melapor ke Satgas dan mereka yang nantinya akan memecahkan masalah tersebut.” (Wawancara, Senin 23 Agustus 2020 Pukul 09.30 WIB)

Sedangkan dari hasil wawancara bersama ibu Seniwati selaku kader PLKB mengatakan bahwa:

“Tentunya masyarakat pasti dilindungi melalui Program Kampung KB ini karena kan kalau kita ingin memberdayakan masyarakat pasti juga ada bentuk perlindungan yang kita lakukan. Melalui program kampung Kb ini hak-hak masyarakat pasti dijamin karna kan sudah bekerjasama juga dengan pihak kepolisian nanti melalui pihak kepolisian akan diproses dan diselesaikan jika ada masyarakat yang bermasalah baik itu seperti yang tadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga ataupun yang lainnya.” (Wawancara, Rabu 13 Oktober 2020 Pukul 10.30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa di Kampung Tualang tersebut sudah membentuk Satgas KDRT yang mana mereka bertugas untuk menyelesaikan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama serta pihak Kepolisian agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga bentuk perlindungan tersebut melalui program Kampung KB itu sudah ada dan tentunya akan memenuhi hak-hak yang ada dimasyarakat.

Dari hasil wawancara bersama ibu Beinarmi selaku Seksi Operasional Rumah Data Kependudukan Kampung Kb Tualang Mengatakan Bahwa:

“Kalau untuk jaminan program Kampung Keluarga Berencana terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) itu saya kurang tau pastinya seperti apa. Tapi yang jelas kalau dalam melindungi masyarakat itu mungkin ya ada dari pihak-pihak yang terkait yang berada di Kampung Tualang baik itu dalam berbagai kasus yang ada dimasyarakat. Karna saya juga belum pernah dengar kalau di Kampung ini ada masalah seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga saya tak pernah dengar.” (Wawancara, Senin 11 Oktober 2020 Pukul 09.30 WIB)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya belum banyak yang mengetahui terkait dengan jaminan program Kampung Keluarga Berencana terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Kampung Tualang. karena yang selama ini mereka tahu bahwasanya jika terjadi sesuatu masalah terkait yang ada dimasyarakat itu hanyalah berurusan dengan pihak kepolisian sementara terkait dengan jaminan Program itu mereka tidak megetahuinya.

Berikut ini adalah hasil wawancara kepada Bapak Amril Teguh sebagai Tokoh Masyarakat Kampung Tualang yaitu sebagai berikut:

“Kalau untuk kasus seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu setau saya memang pernah ada penyuluhan atau sosialisasi diberikan kepada masyarakat terkait kasus KDRT tersebut tapi sudah lama sekali. Sosialisai itu pernah dilakukan seingat saya kami diundang di aula kelurahan bukan di balai, itu pesertanya pasangan suami istri. Disitu diberikan penyuluhan seperti hukumnya, KDRT itu seperti apa, sanksinya apa, kalau misalnya terjadi langkah-langkah nya seperti itu.” (Wawancara, Selasa 24 Agustus 2020 Pukul 13.30 WIB)

Sedangkan dari wawancara bersama Ibu Susanti sebagai masyarakat Kampung Tualang, beliau mengatakan :

“Kalau dalam hal Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu saya kurang tau juga apakah ada bentuk pelindungannya sebab setau saya kalau terjadi kasus tersebut ya mungkin sebaiknya langsung melapor ke kantor polisi saja, jadi saya kurang tau juga kalau dalam hal itu.” (Wawancara, Selasa 24 Agustus 2020 Pukul 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara Bersama Tokoh masyarakat serta masyarakat Kampung Tualang bahwa memang masyarakat Kampung Tualang itu pernah diberikan sosialisai atau penyuluhan-peyuluhan terkait dengan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut namun masih ada juga masyarakat yang belum mengetahui bahwa dikampung mereka ada Satgas khusus yang ditugaskan untuk menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Perlindungan penulis menyimpulkan bahwa bentuk Perlindungan terhadap masyarakat itu sudah ada di Kampung Tualang melalui Program Kampung Kb tersebut. seperti dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sudah ada Satgas khusus yang dibentuk melalui program Kampung Kb tersebut guna memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan adanya masalah-

masalah tersebut dan juga sudah dilakukannya sosialisai terkait dengan masalah KDRT tersebut.

Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa adanya jaminan Program Kampung Keluarga Berencana terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Masyarakat tidak tahu sama sekali bentuk perlindungan tersebut bahkan sampai satgas khusus yang dibentuk saja masih ada yang tidak mengetahuinya.

Karena yang banyak masyarakat tahu jika terjadi masalah-masalah yang ada dimasyarakat mereka hanya langsung melaporkan kepada pihak kepolisian saja tanpa tahu bahwa dikampung merek telah dibentuk Sagas khusus yang betugas memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan adanya masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat.

Hal ini terjadi karena mungkin saja masyarakat tidak dilibatkan didalam pembentukan Satgas khusus yang bertugas memberikan Perlindungan kepada masyarakat ataupun Satgas itu sendiri hanyalah formalitas semata dan tidak aktif di masyarakat. Seharusnya jika memang ada jaminan Program Kampung Keluarga Berencana terhadap hak-hak yang ada dimasyarakat, masyarakat dapat mengetahui agar tercapainya pemberdayaan terhadap masyarakat melalui Program Kampung Kb ini.

Perlindungan tersebut merupakan salah satu indikator penting didalam melakukan pemberdayaan terhdap masyarakat sehingga haruslah jelas bahwa jika memang adanya jaminan terhadap masyarakat melalui Program Kampung Keluarga Berencana ini karena yang peneliti lihat bahwa dalam juknis yang telah

ditetapkan memang ada seksi perlindungan yang ditugaskan melindungi masyarakat namun disini masyarakat haruslah benar-benar mengetahui dan juga dapat nantinya memahami sehingga masyarakat memahami bahwa hak-hak mereka telah dijamin melalui program Kampung Keluarga Berencana ini.

4. Indikator Penyokongan

Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. Arfan Usman M.Pd Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak, mengatakan:

“Bimbingan yang dilakukan tentunya sesuai dengan tugas dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang nantinya mereka akan membentuk seksi-seksi. Dan seksi-seksi tersebut lah yang nantinya akan memberikan bimbingan dengan membuat bentuk-bentuk program yang akan dijalankan sehingga masyarakat dapat dibimbing sesuai dengan bentuk program yang dijalankan.”(Wawancara, Jumat 21 Agustus 2020 Pukul 08.30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas bersama Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak dapat dilihat bahwa adanya bentuk bimbingan yang diberikan kepada masyarakat melalui bentuk program yang dijalankan oleh berbagai seksi yang ditugaskan langsung dalam program Keluarga Berencana ini melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

Berikut adalah wawancara Bersama Bapak Juprianto S.IP, M.Si Selaku Penghulu Kampung Tualang, beliau mengatakan bahwa:

“Selama dijalankannya program Kampung KB ini di kampung Tualang tentunya dukungan itu ya paling cuma diberikan dari pihak yang terkait dengan program Kaampung Kb saja seperti pihak BKKBN nya sendiri dan seperti pihak puskesmas melalui posyandu dan juga pihak keamanan seperti kepolisian karena dikampung Tualang ini adalah salah satu kampung yang memiliki penduduk yang padat dan tentunya sangat sesuai sekali diterapkan program ini di kampung Tualang. Kalau untuk pihak swasta sampai saat ini belum ada. Ya jadi semua mulai dari dana itu datangnya dari pusat, kampung tidak ada anggaran terkait dengan program Kampung Kb ini. Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan semua dari pusat yang mengatur.” (Wawancara, Selasa 24 Agustus 2020 Pukul 07.30 WIB)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Penghulu Kampung Tualang diperoleh gambaran bahwa bentuk dukungan yang diberikan melalui program Kampung KB tersebut hanyalah diberikan oleh pihak-pihak yang terkait saja dengan program Kampung KB tersebut, sedangkan dukungan seperti dari pihak swasta itu bisa dikatakan masih kurangnya dukungan yang diberikan baik itu dukungan berupa dana maupun lainnya. Sehingga semua kegiatan mulai dari dana itu langsung dari pusat karena kampung tidak ada anggaran terkait dengan program Kampung Kb ini karena termasuk Program Pusat.

Dari wawancara bersama Ibu Fatmawati S.Sos Selaku Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kampung Tualang, Beliau mengatakan:

“Tentunya kalau dalam hal bimbingan itu kami telah membentuk seksi-seksi yang nantinya mereka sekaligus membimbing masyarakat sesuai dengan bentuk program yang dijalankan seperti contoh bimbingan yang diberikan oleh seksi reproduksi mereka melakukan bimbingan kepada masyarakat mengenai tata cara memakai alat kontrasepsi yang baik dan benar serta membimbing masyarakat dengan menyertakan slogan 2 anak lebih baik. Saya kira seperti itu.” (Wawancara, Senin 23 Agustus 2020 Pukul 09.30 WIB)

Sedangkan dari hasil wawancara bersama ibu Seniwati selaku kader PLKB mengatakan bahwa:

“Ya jelas bimbingan itu memang sudah kami lakukan terkait dengan bentuk Program yang akan dijalankan kepada masyarakat. Pertama yang kami lakukan itu biasanya membimbing masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing seperti contoh dalam hal membimbing masyarakat agar mengedepankan program Kb itu sudah ada bidang atau seksi khusus yang ditugaskan membimbing masyarakat agar mengedepankan program KB 2 anak lebih baik yakni seksi reproduksi. Semua akan dibimbing sesuai dengan tujuan dari masing-masing bentuk Program.” (Wawancara, Rabu 13 Oktober 2020 Pukul 10.30 WIB)

Dari wawancara bersama Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan juga Kader Kampung KB Tualang dapat dilihat bahwa PLKB dan juga kader telah menyusun seksi-seksi yang nantinya akan memberikan bimbingan terkait dengan bentuk program yang dijalankan. Seperti masyarakat juga dibimbing agar mengikuti slogan 2 anak lebih baik sesuai dengan tujuan Program Kampung KB dan tentunya agar tercapai tujuan dari program tersebut.

Dari hasil wawancara bersama ibu Beinarmi selaku Seksi Operasional Rumah Data Kependudukan Kampung Kb Tualang Mengatakan Bahwa:

“Kalau untuk bimbingan itu ya pasti dibimbing masyarakat kita ini sebab tidak mungkin mereka akan langsung menjalankan program Kampung Kb ini jika tidak dibimbing dan biasanya proses pemberian bimbingan itu sejalan dengan sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan bentuk program yang akan dijalankan yang jelas masyarakat akan diberikan bimbingan dalam menjalankan Program Kb tersebut, namun ya kan kita tahu sendiri kalau tidak semua masyarakat dapat langsung mengerti hanya dengan sekali bimbingan saja sehingga kalau menurut saya pribadi proses pemberian bimbingan kepada masyarakat ini haruslah betul-betul serius agar tercapai dengan tujuan yang diharapkan.” (Wawancara, Senin 11 Oktober 2020 Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas bersama Seksi Operasional Rumah Data Kependudukan Kampung Tualang dapat dilihat bahwasanya proses bimbingan itu memang sudah dilakukan dikampung Tualang hanya saja didalam memberikan bimbingan tersebut haruslah betul-betul diseriuskan karena tidak semua

massyarakat mampu memahami bentuk Program yang dijalankan hanya dengan sekali bimbingan saja.

Berikut adalah wawancara Bersama Bapak Amril Teguh Selaku Tokoh Masyarakat Kampung Tualang, Beliau mengatakan:

“Saya rasa dalam hal bimbingan memang telah dilakukan di kampung Tualang ini namun menurut saya bimbingan tersebut seharusnya rutin dilakukan sehingga masyarakat terdorong ikut serta dalam pelatihan-pelatihan tersebut. Sebab yang selama ini saya lihat bimbingan itu dilakukan hanya sebatas formalitas saja, seharusnya melakukan bimbingan ini kan haruslah diseriuskan sehingga masyarakat tidak lagi acuh tak acuh dengan program Kampung KB ini dan menjadi peduli.”
(Wawancara, Selasa 24 Agustus 2020 Pukul 13.30 WIB)

Sedangkan dari hasil wawancara bersama Ibu Susanti Selaku Masyarakat Kampung Tualang Beliau mengatakan:

“Setau saya kalau bimbingan itu memang sudah dilakukan oleh petugas KB itu kepada kami yang mana pada saat itu kami diberi bimbingan seperti pemasangan alat kontrasepsi serta pengenalan-pengenalan berbagai alat KB sehingga kalau dikatakan melakukan bimbingan memang pernah dilakukan di kampung Tualang ini. Tapi kalau tentang bentuk-bentuk Proram Kampung Kb ini kami tidak tahu.”(Wawancara, Selasa 24 Agustus 2020 Pukul 15.00 WIB)

Dari hasil wawancara bersama Tokoh Masyarakat serta Masyarakat Kampung Tualang dapat dilihat bahwa bimbingan dan dukungan memang telah dilaksanakan di Kampung Tualang. Namun, proses bimbingan tersebut sudah berjalan sejak lama sekali sehingga masyarakat menilai bahwa bimbingan yang dilakukan hanya sebatas formalitas saja. Sehingga masih banyak juga masyarakat yang acuh tak acuh terhadap program Kampung KB ini. Serta masyarakat tidak mengetahui apasaja bentuk-bentuk program yang dijalankan program kampung KB tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai Indikator Penyokongan Penulis menyimpulkan bahwa proses pemberian bimbingan sudah dilakukan di Kampung Kb Tualang melalui seksi-seksi yang telah ditetapkan sesuai dengan bentuk program yang akan dijalankan.

Namun peneliti melihat proses pemberian bimbingan kepada masyarakat tersebut masih kurang efektif dan perlu diperhatikan lebih baik lagi karena mengingat tidak semua masyarakat akan mengerti jika hanya diberikan bimbingan sekali saja karena jika ingin tercapai tujuan Program yang akan dijalankan tentunya masyarakat haruslah betul-betul diberikan bimbingan yang akan nantinya membuat masyarakat menjadi mandiri.

Karena proses pemberian bimbingan ini haruslah sesuai dengan yang diharapkan mengingat masyarakat itu perlu dibimbing dengan serius agar timbul kesadaran dan juga pemahaman masyarakat terkait dengan bentuk Program yang akan dilaksanakan. Serta dari hasil observasi yang peneliti lakukan peneliti juga melihat masih kurangnya dukungan yang diberikan terhadap kampung Kb Tualang terkait dengan jalannya program Kampung Keluarga Berencana tersebut.

Seperti tidak adanya dukungan dari pihak swasta terkait dengan jalannya program Kampung Kb ini baik itu melalui dana maupun yang lainnya. Tentunya jika ada bentuk dukungan tersebut dapat lebih mensukseskan Program Kampung Keluarga Berencana di Kampung Tualang tersebut. Akan lebih baik lagi jika bentuk dukungan tersebut datang dari berbagai pihak lainnya. Karena bentuk dukungan ini adalah salah satu hal pendukung didalam melakukan Pemberdayaan

terhadap masyarakat melalui Program Kampung Kb tersebut melalui indikator Penyokongan didalam melakukan Pemberdayaan terhadap masyarakat.

Belum efektifnya proses bimbingan yang diberikan dan juga tidak adanya dukungan dari pihak lain tentunya dapat menghambat jalannya program Kampung Kb tersebut sehingga tidak tercapainya tujuan dari Program Kampung Kb tersebut. maka dari itu seharusnya Kampung Tualang melalui seksi-seksi atau bidang yang telah ditugaskan betul-betul harus melakukan proses bimbingan kepada masyarakat tidak hanya sebagai formalitas semata.

5. Indikator Pemeliharaan

Pemeliharaan disini ialah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dari wawancara Bersama Bapak Drs. Arfan Usman Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak mengatakan bahwa:

“Tentunya hubungan yang tercipta mulai dari pelaksanaan program kampung KB ini memang harus terjalin dengan baik terutama kepada masyarakat. Karena kan program ini menyangkut kepada bagaimana memberdayakan masyarakat melalui program kampung KB ini. Sehingga dapat memudahkan terutama kepada petugas lapangan didalam menjalankan program kampung Kb ini agar dapat diterima oleh masyarakat setempat dan dapat berhasil.”(Wawancara, Jumat 21 Agustus 2020 Pukul 08.30 WIB)

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa memang didalam menjalankan program kampung Kb tersebut haruslah terlebih dahulu menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat agar masyarakat bisa menerima dengan baik program

yang dijalankan sehingga dapat tercapai tujuan dari program kampung Kb tersebut.

Berikut adalah wawancara Bersama Bapak Juprianto S.Sos, M.IP Selaku Penghulu Kampung Tualang, beliau mengatakan Bahwa :

“Hubungan yang selama ini tercipta menurut saya baik-baik saja karena kan sebelum program kampung Kb ini dijalankan di Kampung Tualang juga memang kita sudah melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat itu sendiri sehingga ya masyarakat menerima dengan baik program yang kita jalankan ini.”(Wawancara, Selasa 24 Agustus 2020 Pukul 07.30 WIB)

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa sebelum program Kampung Kb ini dijalankan di Kampung Tualang memang sudah ada pendekatan yang dilakukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat itu sendiri sehingga hubungan yang terjalin antara pihak pelaksana program dengan masyarakat itu sendiri dapat dikatakan sudah terjalin dengan baik.

Dari hasil wawancara bersama Ibu Fatmawati S.Sos Selaku Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kampung Tualang, Beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya kalau dikatakan kondusif memang sudah berjalan dengan kondusif hanya saja mungkin masih ada masyarakat itu yang masih belum mengerti dan juga masih ada yang acuh tak acuh, padahal kaami selaku PLKB memang sudah melakukan berbagai sosialisasi, ya hanya saja kita kan juga tak dapat memaksakan kehendak masyarakat itu sendiri apalagi tipe-tipe masyarakat itu kan berbeda-beda.” (Wawancara, Senin 23 Agustus 2020 Pukul 09.30 WIB)

Sedangkan dari hasil wawancara bersama ibu Seniwati selaku kader PLKB mengatakan bahwa:

“Kalau saya lihat ya hubungan yang terjalin selama ini baik itu dari kami kader ke masyarakat maupun PLKB ke masyarakat itu sudah

terjalin dengan baik-baik saja yaa, karena kan kami ditugaskan juga harus baik dan ramah kepada masyarakat agar masyarakat menerima dari apa yang kami lakukan ya intinya sih baik-baik aja.” (Wawancara, Rabu 13 Oktober 2020 Pukul 10.30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas bersama Petugas Lapangan Kampung Kb dan juga kader Kampung Kb Tualang dapat dilihat bahwa masih adanya masyarakat yang kurang peduli atau acuh tak acuh terhadap program kampung KB tersebut padahal Petugas Lapangan Kampung Kb itu sendiri telah melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat. Namun hubungan yang tercipta selama ini kepada masyarakat baik-baik saja dan tidak ada masalah melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat yang tentunya berkaitan dengan Program Pemberdayaan masyarakat Kampung Kb tersebut.

Dari hasil wawancara bersama ibu Beinarmi selaku Seksi Operasional Rumah Data Kependudukan Kampung Kb Tualang Mengatakan Bahwa:

“Sejauh ini yang saya lihat ya kalau dikatakan kondusif 100% itu ya belum lah, karena kan gak semuanya tujuan program itu langsung tercapai hanya saja kalau program ini dijalankan sesuai juknis ya sudah dilaksanakan dan kami juga berusaha agar Program Kampung Kb ini benar benar menjadi Progam yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan karena kan Program ini dilaksanakan karena Kampung Tualang ini masuk kedalam kriteria Program sehingga tercapailah tujuan yg kita harapkan.” (Wawancara, Senin 11 Oktober 2020 Pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya Program Kampung Kb ini belum berjalan kondusif fikampung Tulalang karena dapat dilihat bahwa masih ada bentuk Program yang belum tercapai dengan tujuan yang diharapkan sehingga masih belum bisa dikatakan sudah kondusif.

Berikut ini kutipan wawancara bersama Bapak Amril Teguh Selaku Tokoh Masyarakat Kampung Tualang yaitu sebagai berikut ;

“Sejak kampung Kb ini dijalankan memang hubungan yang tercipta itu baik karena mereka pun menyampaikan serta memberikan pelatihan kepada masyarakat itu bisa dikatakan ramah tapi ya memang masyarakat kita ni banyak juga yang tak paham saya lihat ya kepedulian itu masih kurang di masyarakat kita ni.” (Wawancara, Selasa 24 Agustus 2020 Pukul 13.30 WIB)

Sedangkan dari wawancara bersama Ibu Susanti Selaku Masyarakat Kampung Tualang itu sendiri beliau mengatakan, bahwa :

“Selama ini memang yang saya lihat petugas-petugasnya itu baik-baik kemudian ramah juga kepada masyarakat kami pun senang senang juga jadinya kalau ramah begitu jadi menurut saya kalau hubungan selama ini ya cukup baik.”(Wawancara, Selasa 24 Agustus 2020 Pukul 15.00 WIB)

Dari dua hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya memang untuk hubungan yang terjalin antara pelaksana program dengan masyarakat itu sendiri sudah cukup baik karena memang didalam etika maupun perilaku petugas tersebut ramah kepada masyarakat didalam menyampaikan program Kampung Kb tersebut.

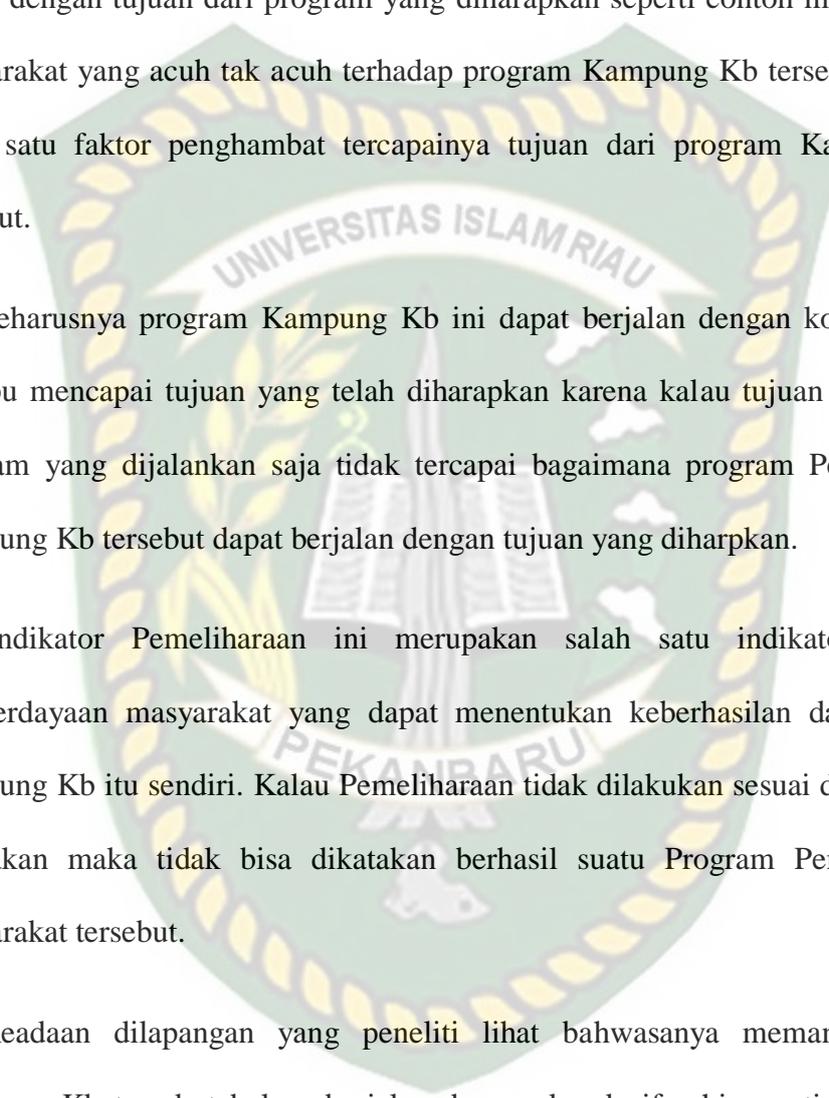
Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator Pemeliharaan penulis menyimpulkan bahwa hubungan yang tercipta dalam pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat melalui Program Kampung Kb di Kampung Tualang sudah terjalin dengan cukup baik dapat dilihat dari hubungan antara PLKB dengan masyarakat dan juga kader serta pihak-pihak yang terkait dengan jalannya program kampung Kb tersebut dengan masyarakat sudah berjalan dengan cukup baik.

Hanya saja jika dikatakan kondusif itu belum terlaksana dengan kondusif karena tidak semua tujuan dari masing-masing bentuk program itu dapat telaksana sesuai dengan tujuan dari program yang diharapkan seperti contoh masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap program Kampung Kb tersebut menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya tujuan dari program Kampung Kb tersebut.

Seharusnya program Kampung Kb ini dapat berjalan dengan kondusif agar mampu mencapai tujuan yang telah diharapkan karena kalau tujuan dari bentuk program yang dijalankan saja tidak tercapai bagaimana program Pemberdayaan Kampung Kb tersebut dapat berjalan dengan tujuan yang diharapkan.

Indikator Pemeliharaan ini merupakan salah satu indikator didalam pemberdayaan masyarakat yang dapat menentukan keberhasilan dari program Kampung Kb itu sendiri. Kalau Pemeliharaan tidak dilakukan sesuai dengan yang diharakan maka tidak bisa dikatakan berhasil suatu Program Pemberdayaan masyarakat tersebut.

Keadaan dilapangan yang peneliti lihat bahwasanya memang program Kampung Kb tersebut belum berjalan dengan kondusif sehingga tidak tercapai tujuan dari Program itu sendiri. Seharusnya pihak yang terlibat dalam program Kampung KB tersebut mampu memelihara situasi yang kondusif terhadap program Kampung Kb itu sehingga nantinya masyarakat maupun pihak yang menjalankan program Kampung Kb ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari Program Kampung Kb itu sendiri.



C. Faktor Penghambat Jalannya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Sebelum Penulis menyimpulkan jalannya Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penulis terlebih dahulu kembali melihat teori yang penulis gunakan yaitu teori Tahapan Pemberdayaan Menurut Suharto (2005:67) teori ini mengemukakan bahwasanya didalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat haruslah melalui beberapa tahapan Pemberdayaan yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, serta Pemeliharaan. Sehingga melalui tahapan Pemberdayaan ini dapat mencapai tujuan dari pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat tersebut.

Selanjutnya yang penulis lakukan setelah melihat teori, yang menjadi alat pertimbangan selanjutnya bagi penulis untuk melihat jalannya Pemberdayaan Terhadap Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak masih terdapat banyak masalah seperti Masih adanya masyarakat yang kurang peduli dan acuh tak acuh terhadap program pemberdayaan kampung kb. ini terbukti dengan sedikitnya masyarakat yang ikut serta dalam sosialisasi/kegiatan yang diadakan, dan juga masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa Kampung Tualang itu adalah Kampung KB, serta tidak adanya bentuk

dukungan yang diberikan oleh pihak swasta disekitar baik berupa dana dan yang lainnya.

Adapun hasil yang didapati oleh penulis melalui wawancara terhadap beberapa informan mengenai faktor penghambat dari Pemberdayaan Masyarakat melalui Program kampung KB di Kampung Tualang ini cukup beragam. Dimulai dari Ibu Fatmawati S.Sos selaku Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kampung Tualang, berikut tanggapannya:

“Menurut saya memang masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap Program kampung kb ini. padahal kami juga sering menghimbau kepada masyarakat untuk dapat hadir jika diadakan sosialisasi maupun pelatihan yang diadakan di balai kb Tualang sehingga terkadang kami juga sulit untuk menyampaikan bentuk program yang akan dijalankan dan juga membentuk pemahman terhadap masyarakat itu sendiri terkait program kampung kb ini. sehingg tidak tersmpaikan sepenuhnya kepda masyarakat bentuk program yang akan dijalankan.”(Wawancara, Senin 23 Agustus 2020 Pukul 09.30 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa memang masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli serta acuh tak acuh terhadap Program Kampung KB ini terbukti dengan masih sedikitnya masyarakat yang turut serta hadir dalam pemberian sosialisasi maupun pelatihan yang diadakan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kampung Tualang sehingga menyulitkan didalam pemberian maupun penjelasan mengenai bentuk program yang akan dijalankan.

Tanggapan selanjutnya dari Ibu Seniwati selaku kader PLKB Kampung Tualang, berikut tanggapannya:

“Memang sejauh ini yang saya lihat kesadaran masyarakat terhadap Program Kampung KB ini masih kurang karena yang saya lihat bahkan masih ada masyarakat yang belum atau tidak mengetahui apa itu

sebenarnya program Kampung KB sehingga terkadang disitu kesulitannya membngkitkan kesadarn masyarakat terhadap program Kampung KB yang dijalankan tersebut sehingga bagaimana tujuan program itu mau tercapai nantinya jika belum adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.”(Wawancara, Rabu 13 Oktober 2020 Pukul 10.30 WIB)

Dari tanggapan diatas sama dengan jawaban informan sebelumnya yang mana yang menjadi faktor penghambat dari jalannya Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Tualang memang belum adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terkait dengan program kampung kb tersebut. sehingga menyulitkan pelaksana program kampung kb didalam memberikan bentuk program yang akan dijalankan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan.

Tanggapan selanjutnya dari Bapak Amril Teguh sebagai Tokoh Masyarakat Kampung Tualang, berikut tanggapannya:

“yang saya tau program kampung kb di kampung tualang ini masih kurang adanya dukungan dari pihak swasta. Menurut saya seharusnya program ini juga ada bentuk dukungan yang diberikan pihak swasta sehingga yaa tentunya dapat membantu ataupun mensukseskan program yang dijalankan ini lah. Banyak dukungan yang diberikan tetntu program ini untuk kedepannya semakin bagus dan layak untuk dilaksanakan.”(Wawancara, Selasa 24 Agustus 2020 Pukul 13.30 WIB)

Dari tanggapan diatas dapat dilihat bahwasanya salah satu faktor penghambat dari jalannya Program Kampung Keluarga Berencana ini ialah kurang adanya dukungan dari pihak swasta baik itu berupa dana maupun yang lainnya yang tentunya jika ada dapat mensukseskan program kampung Kb ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan melalui observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan faktor penghambat terhadap jalannya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga

Berencana (KB) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dapat dilihat sebagai berikut:

1. Masih adanya masyarakat yang kurang peduli dan acuh tak acuh terhadap program pemberdayaan Kampung KB. ini terbukti dengan sedikitnya masyarakat yang ikut serta dalam sosialisasi/kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kampung Tualang. hal itulah yang membuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan hanya kepada orang yang mau ikut saja sehingga tidak merata kepada semua pihak masyarakat yang ada dalam ruang lingkup Kampung Tualang.
2. Masih adanya masyarakat yang tidak memahami bahkan tidak mengetahui bahwa Kampung Tualang itu sendiri ialah Kampung Kb yang mana memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
3. Tidak adanya bentuk dukungan yang diberikan oleh pihak swasta disektar baik berupa dana dan yang lainnya, yang kalau ada tentu dapat membantu serta mendukung jalannya program pemberdayaan masyarakat ini yakni Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang didapatkan dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tidak berjalan dengan efektif. Analisis yang dilakukan mendapati bahwa dari beberapa indikator didalam melakukan pemberdayaan menurut Suharto (2005: 67) dapat dilihat bahwa dalam indikator pemungkinan memang sudah adanya regulasi terkait dengan jalannya Program Kampung KB tersebut. Namun didalam menjalankan Program tersebut masih banyak didapati kekurangan atau masalah seperti didalam upaya Penguatan Serta Penyokongan masih kurangnya pemberian motivasi kepada masyarakat terhadap program Kampung KB ini, lokasi balai penyuluhan yang cukup jauh, belum mampunya pihak pelaksana Kampung KB didalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap program yang dijalankan, masih banyaknya masyarakat yang acuh tak acuh

terhadap program Kampung KB ini terbukti dengan hanya sedikitnya masyarakat yang ikut serta dalam sosialisasi terhadap program Kampung KB sehingga memicu belum terlaksananya tujuan yang diharapkan dari program Kampung KB tersebut. Bahkan masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui tentang Program Kampung KB itu sendiri, serta belum adanya dukungan dari pihak-pihak lain seperti pihak swasta terhadap program yang dijalankan baik itu berupa dana maupun yang lainnya tentunya ini menjadi penyebab Program Kampung Kb ini tidak berjalan dengan efektif.

2. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya hambatan yang didapati dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Kb di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Meliputi : a) Masih adanya masyarakat yang kurang peduli dan acuh tak acuh terhadap program Pemberdayaan Kampung Kb tersebut. b) Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui Program Kampung Kb. c) Tidak adanya dukungan dari pihak seperti swasta terhadap program Kampung KB tersbut. d) Kurangnya pemberian motivasi serta pemahaman kepada masyarakat oleh pihak Pelaksana Program Kampung KB.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat didalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Kampung Tualang melalui Program Kampung Kb ini harus memberikan motivasi untuk ber KB kepada masyarakat terutama kepada Pasangan Usia Subur (PUS) guna meningkatkan minat masyarakat untuk aktif didalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) tersebut. Tentunya melalui pendekatan-pendekatan yang mampu memotivasi serta mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa Program Pemberdayaan Kampung Kb tersebut mampu menjadikan Masyarakat yang berkualitas,mandiri serta sejahtera.
2. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kampung Tualang perlu membangun kesadaran akan pentingnya Program Kampung KB tersebut kepada masyarakat Kampung Tualang.
3. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) perlu membangun pemahaman masyarakat terkait dengan program Kampung KB itu sendiri bisa berupa pemberian sosialisasi dari rumah kerumah atau pada acara-acara kemasyarakatan sehingga nantinya masyarakat akan mampu memahami serta ikut menjalankan program KB tersebut.
4. Disarankan kepada Pemerintah Kampung Tualang agar bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti Pihak swasta yang ada di sekitar Kampung Tualang sehingga dapat mensukseskan program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kb tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Handono, B. Edii. 2005. *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: FPPD.
- Iskandar. 2008. *Metode penelitian pendidikan dan sosial (Kuantitatif dan kualitatif)*. Jakarta: GT Press.
- Joeniarto, R. (1979). *Perkembangan Pemerintah Lokal*. Bandung: Alumni.
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koswara, E. (2003). *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta: IIP Pres.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta: Renika Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi ilmu pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media
- Nurcholis, Hanif. 2004. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Rasyid, Ryaas. 2002. *Makna pemerintahan* Jakarta: Mutiara Sumber daya.

Santoso, Singih. 2003. *Mengatasi Berbagai Masalah dengan SPSS Versi 12*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Masdar Maju.

Sugiono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Albeta.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Suprihatini, Amin. 2007. *Pemerintah Desa dan Kelurahan*. Jakarta : Cempaka Putih.

Suryaningrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Wasistiono, sadu dan simangunsong fernandes, 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jatinangor Bandung : IPDN PRESS*.

Wasistiono, Sadu. 1998. *Pemberdayaan Aparatur Daerah*. Bandung: Abdi Praja.

Wrihatnolo, R R, Dwidjowijoto, R N. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elek Media Komputindo.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

JURNAL

Arisqi Istiadi dan Hj. Weni Rosdiana. (2012). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Pada Kelompok Sasaran Keluarga Dengan Remaja di Dusun Waung Desa Sonoagung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 1 No.1 (2012), hal 0-216.

Agus Raikhani, Novy Setia Yunas, Linda Ratnasari, Iswari Hariastuti. (2017). Analisa Kontribusi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK Di Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Universitas Darul Ulum Jombang*, (2017), hal 101-113.

Mardiyono. (2017). Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat / Keluarga Di Jawa Timur. (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso). *Jurnal Cakrawala*, Vol. 11 No. 2 (2017), hal 129-136.

Nosa Arighi Bachtiyar dan Sri Wibawani. (2017). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Dusun Ambeng-Ambeng Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Dinamika Governance*, Volume 7 No. 1 (2017), hal 13-26.

Siti Nunung Nurjannah dan Euis Susanti. (2018). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada*, Vol. 09 No. 02 (2018), hal 78-85.

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, 2015. *Petunjuk Tehnis Kampung KB*.